

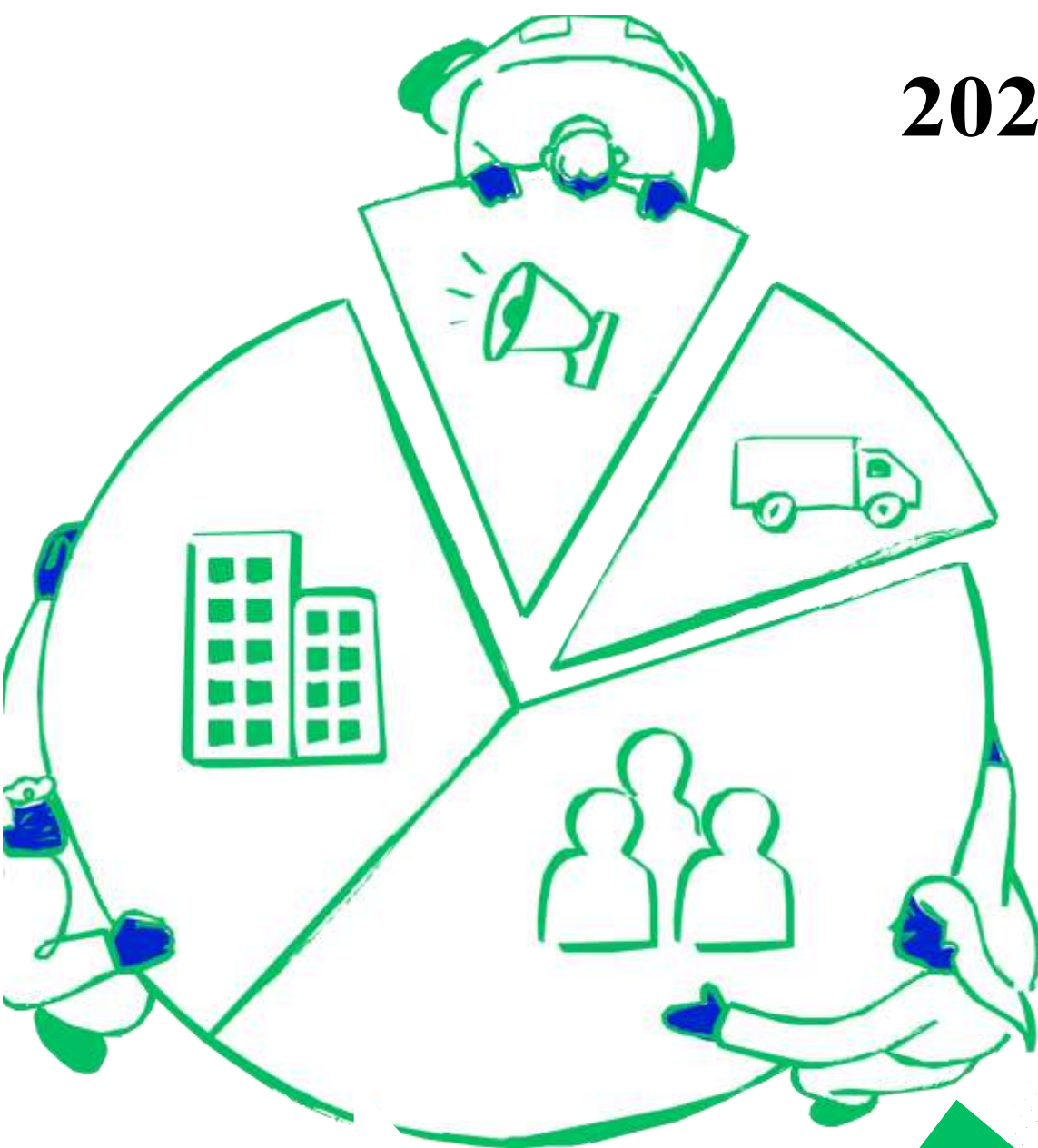


BADAN POM

RENCANA STRATEGIS

LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG

2025-2029



Bpom_buleleng



Loka POM di Buleleng



Loka_buleleng@pom.go.id



08191 500 533

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BULELENG
NOMOR HK.02.02.9C.12.25.80 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BULELENG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum Kedua huruf a Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka POM di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Buleleng memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. Acuan bagi Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. Dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Buleleng.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Buleleng
pada tanggal 5 Desember 2025
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BULELENG,



RAI GUNAWAN

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera,
Shalom, Namo Buddaya, Salam Kebajikan
Rahayu, Rahayu, Rahayu.



Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Buleleng 2025-2029 merupakan rencana lima tahun yang mengacu pada RENSTRA Badan POM 2025-2029.

Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan Lembaga perlu Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RPT/RKP.

Adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan peraturan baru terkait Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan atas perubahan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menuntut Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng untuk melakukan perubahan strategi program dan kegiatan sesuai dengan arah strategi BPOM.

Renstra Loka POM di Kabupaten Buleleng disusun untuk mendukung program dan kegiatan Badan POM. Renstra memuat visi, misi, sasaran, tujuan strategi kegiatan yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 2025-2029. Dalam renstra Loka POM di Kabupaten Buleleng telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Sasaran

Kegiatan serta kerangka pendanaannya. Renstra tersebut merupakan pedoman bagi Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Buleleng. Besar harapan kami agar Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 yang telah disusun dapat memberikan manfaat bagi pencapaian visi, misi, serta tujuan Badan POM.

Om Santih, Santih, Santih, Om.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Singaraja, 05 Desember 2025

Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng



RAI GUNAWAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR TABEL	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	50
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN	71
2.1. Visi	71
2.2. Misi	72
2.3. Tujuan BPOM	75
2.4. Sasaran Kegiatan	78
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	94
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	94
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Buleleng	98
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	103
4.1. Target Kinerja	103
4.2. Kerangka Pendanaan	108
BAB V PENUTUP	110
LAMPIRAN 1 MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025-2029	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaen Buleleng.....	3
Gambar 1. 2	Nilai Kinerja Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2020 - 2024	17
Gambar 1. 3	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024.....	19
Gambar 1. 4	Tren Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024.....	20
Gambar 1. 5	Tren Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	21
Gambar 1. 6	Tren Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024	22
Gambar 1. 7	Tren Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	23
Gambar 1. 8	Tren Presentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2020-2024.....	25
Gambar 1. 9	Tren Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2020-2024	26
Gambar 1. 10	Tren Persentase Keputusan Penilaian sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024	27
Gambar 1. 11	Tren Persentase sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020-2024	28
Gambar 1. 12	Tren Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020-2024.....	29
Gambar 1. 13	Tren Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik Yang Baik Tahun 2020-2024.....	30
Gambar 1. 14	Tren Persentase Keterlibatan UPT Dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024	31
Gambar 1. 15	Tren Persentase Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020-2024	33
Gambar 1. 16	Tren Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar.....	34
Gambar 1. 17	Tren Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar.....	35
Gambar 1. 18	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2020-2024	37

Gambar 1. 19 Tren Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT Tahun 2020-2024.....	38
Gambar 1. 20 Tren Nilai Akip UPT Tahun 2020-2024	39
Gambar 1. 21 Tren Persentase Dokumen Ketatausahaan Yang Dilaporkan Tepat Waktu Tahun 2020-2024	40
Gambar 1. 22 Tren Presentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu Tahun 2020-2024	40
Gambar 1. 23 Tren Persentase Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2020-2024	41
Gambar 1. 24 Tren Persentase Indeks Profesionalitas ASN UPT Tahun 2020-2024.....	42
Gambar 1. 25 Tren Indeks Pengelolaan data dan Informasi UPT Yang Optimal.....	44
Gambar 1. 26 Tren Nilai Kinerja Anggaran UPT Tahun 2020-2024	45
Gambar 1. 27 Tren Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2020-2024.....	46
Gambar 1. 28 Tren Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2020-2024	47
Gambar 1. 29 Tren Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2020-2024	47
Gambar 1. 30 Tren Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT Tahun 2020-2024	48
Gambar 2. 1 Misi Presiden (Asta Cita).....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Renstra Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024	8
Tabel 1. 2 Matriks Ringkasan Analisis SWOT	69
Tabel 2. 1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029	77
Tabel 2. 2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Loka POM di Kabupaten Buleleng periode 2025-2029	83
Tabel 2. 3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Loka POM di Kabupaten Buleleng	90
Tabel 3. 1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Buleleng 2025- 2029	100
Tabel 4. 1 Matriks Kinerja Loka POM di Kabupaten Buleleng 2025-2029	103
Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Buleleng 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan	108
Tabel 4. 3 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Buleleng 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

BPOM beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPOM untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan Obat dan Makanan. Renstra BPOM dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Pendekatan ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Sejalan dengan Renstra BPOM 2025-2029, Loka POM di Kabupaten Buleleng juga mengembangkan Renstra 2025-2029 sebagai upaya lembaga untuk terus melindungi

kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana, terarah dan terukur untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia terutama di wilayah kerja Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana memiliki akses terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan efektif.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Sediaan farmasi dan pangan olahan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Buleleng merupakan Unit Pelaksanaan Teknis BPOM dengan cakupan wilayah kerja sebanyak 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Bali, yakni Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tugas pokok Loka POM di Kabupaten Buleleng adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, serta keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut diatas, Loka POM di Kabupaten Buleleng mendukung menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan olahan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian sederhana Obat dan Makanan;

- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Loka POM Kabupaten Buleleng sebagai garda depan dalam hal perlindungan terhadap masyarakat di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Buleleng dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaen Buleleng

Loka POM di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023, terdiri atas:

- 1) Kepala Loka POM;
- 2) Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2020 bahwa seluruh Loka POM dipimpin oleh Kepala. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng dibantu secara langsung oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Loka POM Kabupaten Buleleng terdapat beberapa kelompok jabatan fungsional antara lain:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan Farmasi dan Makanan Ahli

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan Sediaan farmasi dan pangan olahan. Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yaitu melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang meliputi standarisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan dan penyuluhan terkait sediaan farmasi dan pangan olahan. Di Loka POM di Kabupaten Buleleng Kelompok Jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan terdiri atas beberapa jenjang:

- a) Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama dengan jumlah 9 (sembilan) petugas;
 - b) Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda dengan jumlah 5 (lima) petugas.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN

Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/Lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Loka POM di Kabupaten Buleleng memiliki 2 (dua) petugas dengan Jabatan Fungsional sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama.

3) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Jabatan Fungsional Pranata Komputer diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer. Loka POM di Kabupaten Buleleng memiliki 1 (satu) petugas dengan Jabatan Fungsional sebagai Pranata Komputer.

4) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Kelompok Jabatan Fungsional Umum di Loka POM di Kabupaten Buleleng yaitu Jabatan Fungsional Umum-Analisis Keuangan.

Loka POM di Kabupaten Buleleng per tanggal 1 Juni 2025 memperoleh tambahan 5 (lima) orang CPNS yaitu dengan jabatan penata kelola sediaan farmasi dan pangan olahan. Perencana Ahli Pertama, Pranata SDM Aparatur Terampil, Pranata Keuangan APBN Terampil, Arsiparis Terampil dan 1 (satu) orang PPPK dengan jabatan Penata Layanan Operasional.

1.1.1. Capaian Kinerja Renstra Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2020 – 2024

Sesuai dengan sasaran dan indikator agenda pembangunan, indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terkait BPOM yaitu:

- 1) Persentase Obat yang memenuhi Syarat; dan
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi Syarat yang diukur berdasarkan *tools* pengukuran capaian indikator yang digunakan oleh BPOM.

Uraian	T/R	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase	T	80,80	83,60	86,60	90,00	92,30
Obat	R	77,53	70,77	96,88	85,27	96,06
Memenuhi Syarat	%	95,95	84,65	111,87	94,74	104,07
Persentase	T	78,00	93,00	94,00	95,00	94,00
Makanan	R	93,33	80,43	88,89	93,75	87,50
Memenuhi Syarat	%	119,65	86,48	94,56	98,68	93,09

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

Realisasi indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat dari tahun 2020-2024 berfluktuasi yaitu 77,53 % (Tujuh puluh tujuh koma lima tiga persen), ditahun 2020; 70,77% (Tujuh puluh koma tujuh tujuh persen) di tahun 2021; 96,88% (Sembilan puluh enam koma delapan delapan persen) di tahun 2022; 85,27% (delapan puluh lima koma dua tujuh persen) di tahun 2023; 96,06 % (Sembilan puluh enam koma nol enam persen) di tahun 2024, dimana pada tahun 2020,2021, dan 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini terjadi karena metode sampling acak yang digunakan dapat menggambarkan kondisi *real* kualitas Obat beredar di masyarakat, sehingga probabilitas hasil pemeriksaan dan pengujian sampel TMS menjadi tinggi. Peningkatan capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat disebabkan oleh mulai meningkatnya kepatuhan pelaku usaha baik dari pihak produsen dalam menerapkan cara produksi yang dapat menjamin mutu dan keamanan produk tetap memenuhi persyaratan dan penggunaan label yang memenuhi ketentuan. Serta dari pelaku usaha distribusi yang menerapkan pengelolaan dalam penyimpanan dan transportasi produk yang terjaga mutunya hingga ke tangan konsumen.

Realisasi indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat ditahun 2020 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 93,33 (Sembilan puluh tiga koma tiga tiga) . Pada tahun 2021 dengan realisasi 80,43 (delapan puluh koma empat tiga) , tahun 2022 dengan realisasi 88,89 (delapan puluh delapan koma delapan sembilan), tahun 2023 93,75 (sembilan puluh tiga koma tujuh lima) , dan pada tahun 2024 dengan realisasi 87,50 (delapan puluh tujuh koma lima puluh)

tidak mencapai target karena banyaknya sampel makan yang tidak memenuhi syarat (TMS) terutama disebabkan oleh TMK label/penanda. Pelaksanaan sampling Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng dilakukan secara langsung di sarana distribusi pangan serta melalui sampling online sesuai dengan pedoman sampling dengan pelaksanaan metode sampling secara langsung (*onsite*) menyebabkan jenis sampel acak Makanan yang didapat lebih bervariasi jenisnya.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Sediaan farmasi dan pangan olahan yang berkualitas melalui kampanye Cek KLIK pada kegiatan KIE untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan, Pengalokasian anggaran melalui DAK Nonfisik Subbidang Pengawasan Sediaan farmasi dan pangan olahan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara efektif, dan Evaluasi dan kajian strategi sampling dan pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan sehingga pengambilan sampel lebih representatif terhadap jumlah produk obat yang beredar.

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Renstra Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK1: Terwujudnya Sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu															
IKSK 1 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	77,53	95,95	83,60	70,77	84,65	86,60	96,88	111,87	90,00	85,27	94,74	92,30	96,06	104,07
IKSK 2 – Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	78,00	93,33	119,65	93,00	80,43	86,48	94,00	88,89	94,56	95,00	93,75	98,68	94,00	87,50	93,09
IKSK 3 – Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	80,00	72,00	90,00	83,00	75,56	91,04	86,00	95,65	111,22	89,00	83,33	93,63	92,00	94,00	102,17
IKSK 4 – Persentase Makanan yang Aman dan	77,00	91,67	119,05	91,50	100,00	109,29	92,00	88,89	96,62	93,00	77,78	83,63	93,50	95,24	101,86

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan															
SK2: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan															
IKSK 5 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,50	93,11	105,2
SK3: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan															
IKSK 6 – Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	100,00	114,94	100,00	92,71	92,71	100,00	145,00	145,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKSK 7 - Persentase	45,70	46,38	101,48	53,00	64,87	122,40	60,00	78,00	130,00	68,00	70,00	102,94	75,00	79,41	105,88

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan															
IKSK 8 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	100,00	117,64	99,50	72,73	73,10	100,00	66,67	66,67	100,00	96,00	96,00	100,00	95,65	95,65
IKSK 9 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00	73,33	159,41	73,00	48,57	66,53	77,00	48,57	63,08	81,00	29,73	36,70	85,00	89,13	104,86
IKSK 10 - Persentase sarana distribusi Obat dan	55,00	68,25	124,09	68,00	61,49	90,43	71,00	65,52	92,28	73,00	44,93	61,55	75,00	81,29	108,39

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Makanan yang memenuhi ketentuan															
IKSK 11 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	-	77,00	100,00	129,87	79,00	83,00	105,06	100,00	100,00	100,00
IKSK 12 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,00	100,00	105,3

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota															
SK4 : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan															
IKSS 13 - Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	72,00	92,40	128,33	89,60	91,54	102,17	90,50	91,00	100,55	91,40	93,75	102,57	94,60	95,14	100,57
SK5 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan															
IKSK 14 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	89,91	179,82	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	60,00	120,00	50,00	60,00	120,00
IKSK 15 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	97,62	195,24	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	60,00	120,00	50,00	60,00	120,00

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK6 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan															
IKSK 16 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	71,00	85,00	119,71	85,00	100,00	117,65	87,00	85,00	97,70	88,00	96,25	109,38	90,00	100,00	111,11
SK7: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama BPOM yang optimal															
IKSK17 - Nilai AKIP UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,20	70,78	86,11	74,29	73,06	98,34
IKSK 18 - Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	91,00	100,00	109,89	100,00	100,00	100,00	88,20	100,00	113,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKSK 19 - Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

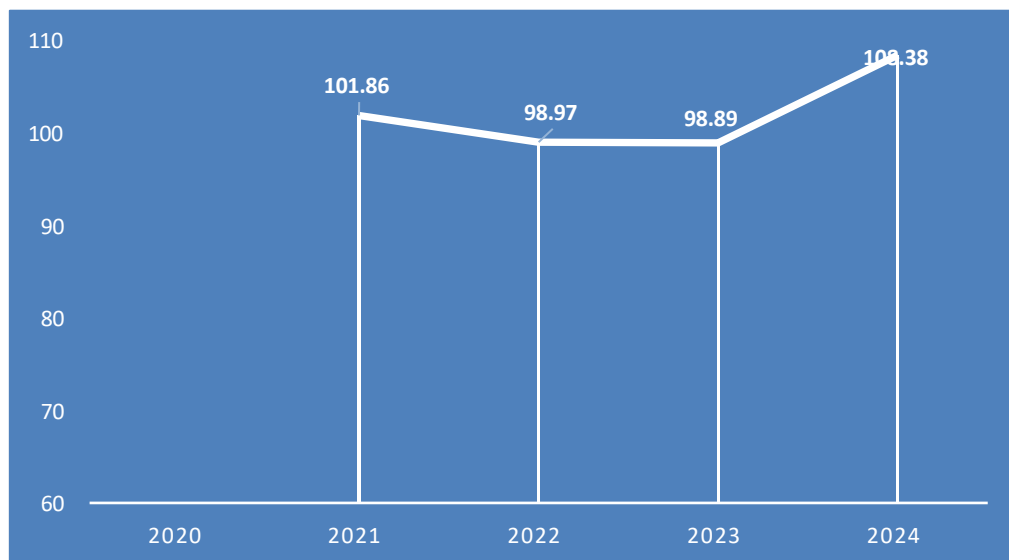
IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK 20 - Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IKSK 21 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,59	89,18	117,98
SK8: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal															
IKSK 22 – Indeks Profesionalitas ASN UPT	75,00	77,79	103,72	79,00	85,00	107,59	80,00	83,24	104,05	81,00	87,84	108,44	88,59	87,06	98,27
SK9: Menguatnya laboratorium, analisis/kajian, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan															
IKSK 22 - Indeks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	2,50	100,00	3,00	3,6	120

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal															
SK10: Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel															
IKSK-23 Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	-	-	-	90,60	77,00	84,99	91,8	90,78	98,89	87,83	90,52	103,06
IKSK-24 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,13	95,00	124,79
IKSK-25 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,00	89,87	147,33
IKSK-26 Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	96,53	160,88

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK-27 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	86,00	75,00	87,21	88,00	100,00	113,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Buleleng 2020,2021,2022,2023, Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2024).

Selama 5 (lima) tahun terakhir, nilai kinerja Loka POM di Kabupaten Buleleng periode 2020 hingga 2024 terjadi peningkatan. Penilaian kinerja Loka POM di Kabupaten Buleleng dimulai pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 terjadi perubahan indikator kinerja dikarenakan perubahan status menjadi satker mandiri. Loka POM di Kabupaten Buleleng selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya.



Gambar 1. 2 Nilai Kinerja Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2020 - 2024

Pengukuran kinerja Loka POM di Kabupaten Buleleng mengacu pada Sasaran Kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran kegiatan, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Kegiatan prioritas BPOM selama periode 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Pengawasan produk setelah beredar bertujuan untuk memastikan konsistensi produk terhadap data yang disampaikan dan disetujui saat perizinan melalui inspeksi di sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian produk, farmakovigilans, serta pengawasan penandaan dan iklan produk. Dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah sarana produksi dan distribusi yang diperiksa dan diawasi menunjukkan tren yang meningkat

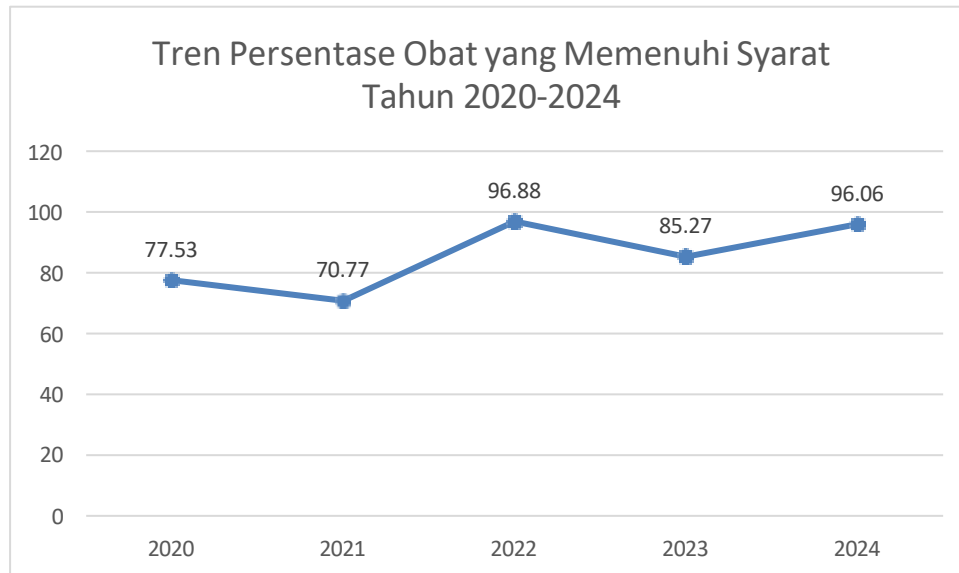
dengan total sebanyak 139.792 sarana.

2. Patroli Siber Obat dan Makanan merupakan kegiatan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring. Pada pelaksanaannya, BPOM berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta asosiasi *e-commerce*, dalam hal ini idEA (*Indonesian E-commerce Association*). Dalam kurun waktu 2020 s.d. September 2024, BPOM menemukan 674 tautan daring yang mengedarkan Sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal. Terhadap temuan tersebut, telah dilakukan penurunan konten secara kolaboratif dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan idEA.
3. BPOM melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman terhadap persyaratan, asistensi dalam proses registrasi baik dalam hal pemenuhan persyaratan teknis maupun akses teknologi online yang diterapkan dalam proses registrasi produk. selama tahun 2022-2024 telah dilakukan pendampingan terhadap 3.220 UMKM.
4. Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku serta mendorong masyarakat agar dapat melindungi dirinya sendiri dari produk Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan, BPOM melaksanakan program strategis pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).

Loka POM di Kabupaten Buleleng memiliki 10 Sasaran Kegiatan (SK) dan 28 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan (SK1) : Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut: (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat; (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat; (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan;



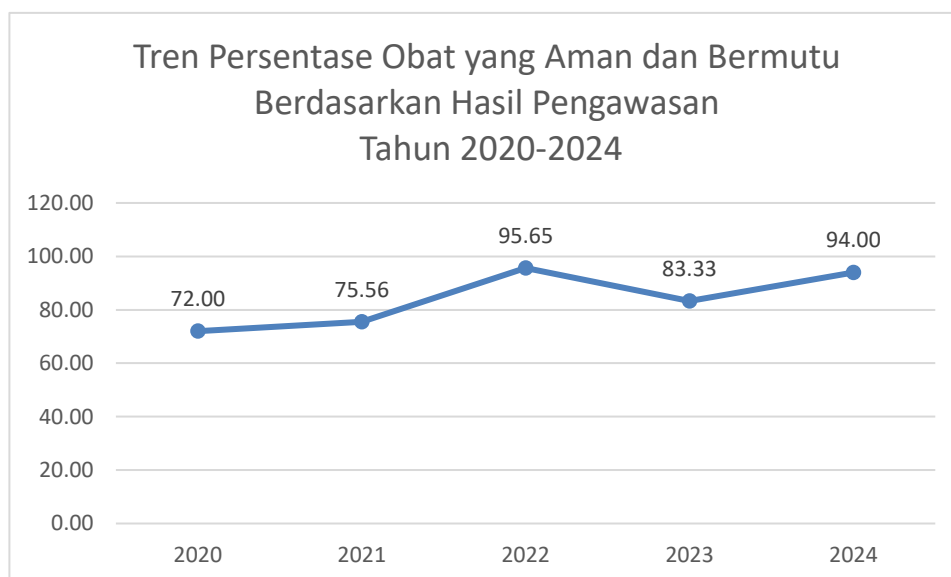
Gambar 1. 3 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017) dan obat kuasi (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Persentase Obat yang memenuhi syarat paling rendah di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah sampel TMS pada tahap pemeriksaan (Tanpa Izin Edar (TIE)/ ilegal/ palsu, rusak, kedaluwarsa, TMK label/ penandaan). Kondisi ini terjadi karena metode sampling acak yang digunakan dapat menggambarkan kondisi *real* kualitas Obat beredar di masyarakat, sehingga probabilitas hasil pemeriksaan dan pengujian sampel TMS menjadi tinggi. Peningkatan capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat disebabkan oleh mulai meningkatnya kepatuhan pelaku usaha baik dari pihak produsen dalam menerapkan cara produksi yang dapat menjamin mutu dan keamanan produk tetap memenuhi persyaratan dan penggunaan label yang memenuhi ketentuan. Serta dari pelaku usaha distribusi yang menerapkan pengelolaan dalam penyimpanan dan transportasi produk yang terjaga mutunya hingga ke tangan konsumen.



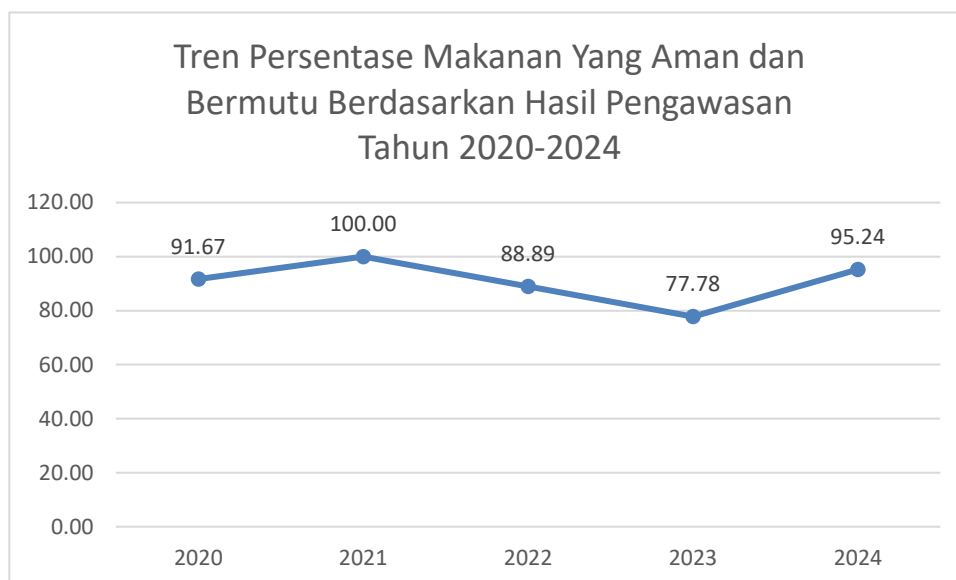
Gambar 1. 4 Tren Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2020-2024 menunjukkan trend yang fluktuatif. Rendahnya nilai capaian menunjukkan banyaknya sampel makan yang tidak memenuhi syarat (TMS) terutama disebabkan oleh TMK label/penandaan. Pelaksanaan sampling Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng dilakukan secara langsung di sarana distribusi pangan serta melalui sampling online sesuai dengan pedoman sampling dengan pelaksanaan metode sampling secara langsung (*onsite*) menyebabkan jenis sampel acak Makanan yang didapat lebih bervariasi jenisnya.



Gambar 1. 5 Tren Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024

Tren Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan capaian. Metode yang digunakan adalah *sampling targeted* yaitu pengujian terhadap sampel yang berisiko tinggi terhadap kesehatan atau telah memiliki riwayat TMS. Peningkatan capaian menunjukkan bahwa telah meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam melakukan perbaikan dan menjaga kualitas serta keamanan produknya secara berkesinambungan.



Gambar 1. 6 Tren Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024

Sampel makanan yang diperiksa adalah sampel makanan yang disampling dengan metode targeted sesuai dengan pedoman sampling termasuk didalamnya yaitu sampel dari UMKM pangan binaan Loka POM di Kabupaten Buleleng. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan paling rendah di tahun 2023 namun kembali meningkat di tahun 2024. Hal ini menunjukkan efektifnya tindak lanjut yang dilakukan oleh BPOM sehingga meningkatnya kesadaran pelaku usaha produsen pangan untuk menjaga mutu dan keamanan produk pangan yang diproduksi.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK1 yaitu: a) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Sediaan farmasi dan pangan olahan yang berkualitas melalui kampanye Cek KLIK pada kegiatan KIE untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan farmasi dan pangan olahan; b) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; c) pengalokasian anggaran melalui DAK Nonfisik Subbidang Pengawasan Sediaan farmasi dan pangan olahan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan secara efektif; dan (d) evaluasi

dan kajian strategi sampling dan pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan sehingga pengambilan sampel lebih representatif terhadap jumlah produk obat yang beredar.

2. Sasaran Kegiatan (SK2) : Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Sediaan farmasi dan pangan olahan

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM.



Gambar 1. 7 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT Tahun 2020-2024

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik baru menjadi penilaian IKU untuk Loka POM di Kabupaten Buleleng pada tahun 2024. Namun pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik telah dilakukan dari tahun 2020. Nilai indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT Tahun 2024 yang tinggi menunjukkan persepsi masyarakat secara keseluruhan terhadap layanan publik yang diberikan oleh Loka

POM di Kabupaten Buleleng sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam melakukan perbaikan dan tindak lanjut terhadap masukan yang diberikan oleh masyarakat melalui survey kepuasan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan public yang diberikan baik dari segi persyaratan pelayanan, petugas pelayanan, maupun sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK2 yaitu: a) Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BPOM; b) meningkatkan kegiatan *public relation* dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM melalui berbagai media; c) Meningkatkan engagement dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja; d) melakukan sosialisasi tentang layanan, menyederhanakan persyaratan, mengoptimalkan berbagai media untuk konsultasi, dan memberikan pendampingan kepada pelanggan; e) setiap UPP di lingkungan BPOM agar menyusun rencana aksi tindak lanjut per jenis layanan atas 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah serta memperhatikan saran/masukan responden pada saat pelaksanaan SKM.

3. Sasaran Kegiatan (SK3) : Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Capaian sasaran kegiatan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; dan (5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; (6) Persentase UMKM yang

memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik; dan (7) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.



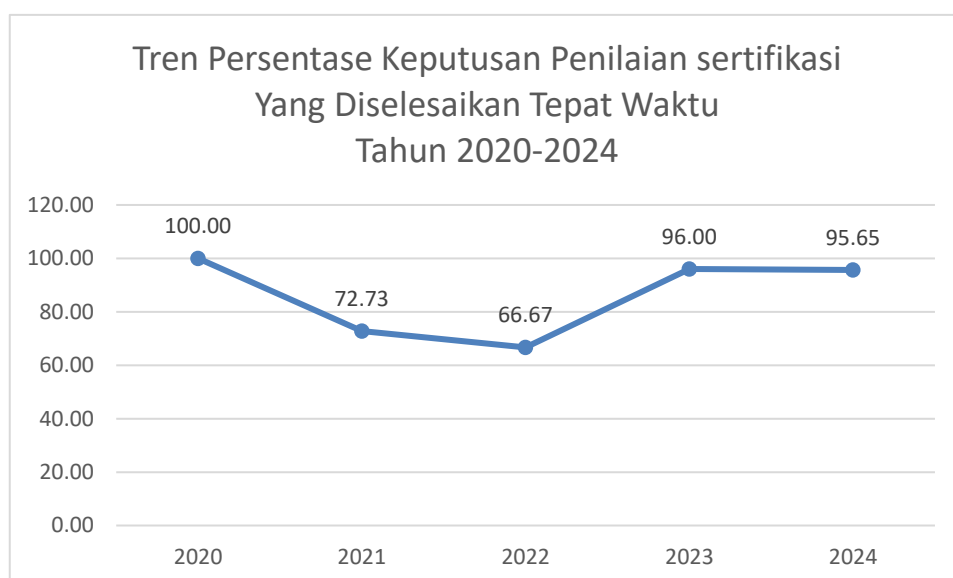
Gambar 1. 8 Tren Presentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2020-2024

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan karena pelaku usaha melakukan pelanggaran dan ketidaksesuaian penerapan antara peraturan dan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE. Trend yang meningkat pada Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan menunjukkan seluruh petugas menyelesaikan laporan tindak lanjut hasil inspeksi secara tepat waktu melalui SIPT sesuai dengan pedoman tindak lanjut hasil pengawasan yang telah ditentukan.



Gambar 1. 9 Tren Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2020-2024

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan untuk melakukan perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor. Tren yang meningkat menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha memahami cara pengisian formulir CAPA untuk perbaikan temuan hasil dari inpeksi ke sarana dan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyelesaikan seluruh perbaikan dari hasil temuan yang tertuang dalam surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng.



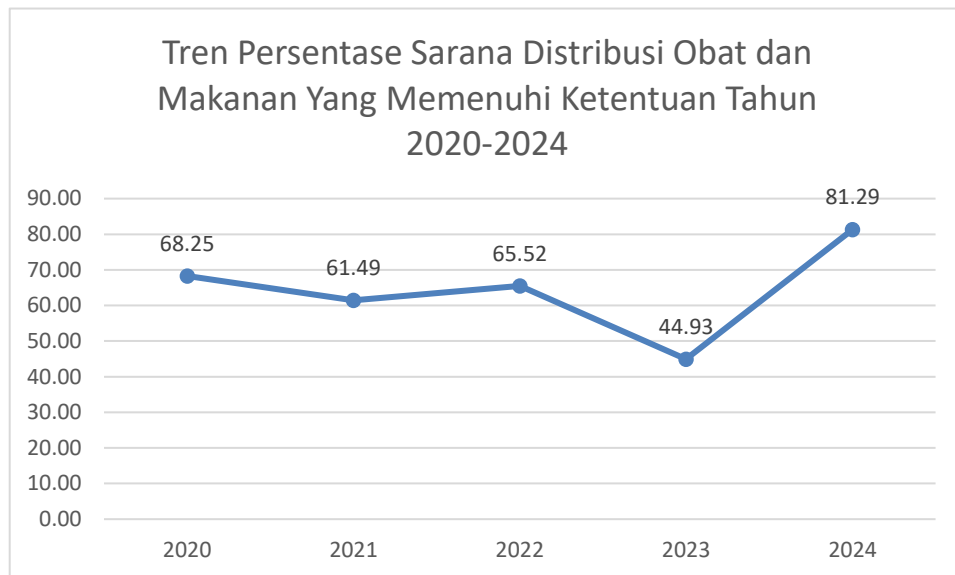
Gambar 1. 10 Tren Persentase Keputusan Penilaian sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024

Keputusan penilaian Sertifikasi meliputi: Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2, dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk obat tradisional, Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk Kosmetika, Rekomendasi/keputusan pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar, Hasil Pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka Sertifikasi CDOB. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu yang paling rendah di tahun 2022. Hal ini dikarenakan keterlambatan pelaku usaha dalam menyampaikan perbaikan terhadap hasil evaluasi sertifikasi. Pendampingan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng kepada pelaku usaha secara berkesinambungan baik melalui bimbingan teknis dan sosialisasi untuk memenuhi kelengkapan persyaratan proses sertifikasi berhasil meningkatkan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun-tahun berikutnya.



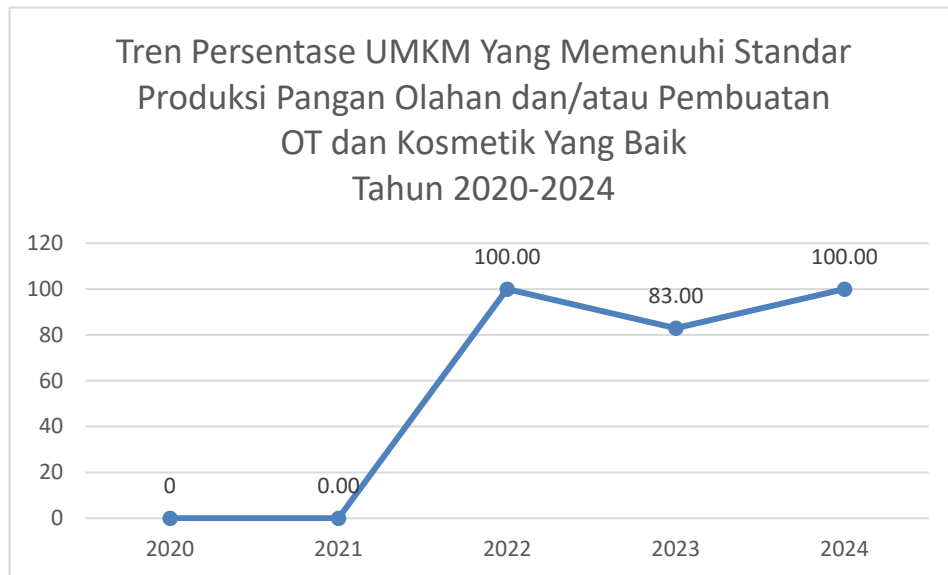
Gambar 1. 11 Tren Persentase sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020-2024

Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan terendah pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan sarana produksi dan UMKM cenderung tidak konsisten menerapkan Cara Produksi yang Baik karena kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menerapkan dan melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan sarana yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui peningkatan dan pembinaan terhadap sarana Produksi melalui pembinaan Cara Produksi Obat dan Makanan yang Baik secara langsung pada saat pengawasan sehingga perbaikan langsung dilakukan oleh pelaku usaha untuk dapat memenuhi ketentuan Cara Produksi Obat dan Makanan yang Baik serta secara berkala melakukan *follow up* terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan berhasil meningkatkan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan terendah pada tahun 2024.



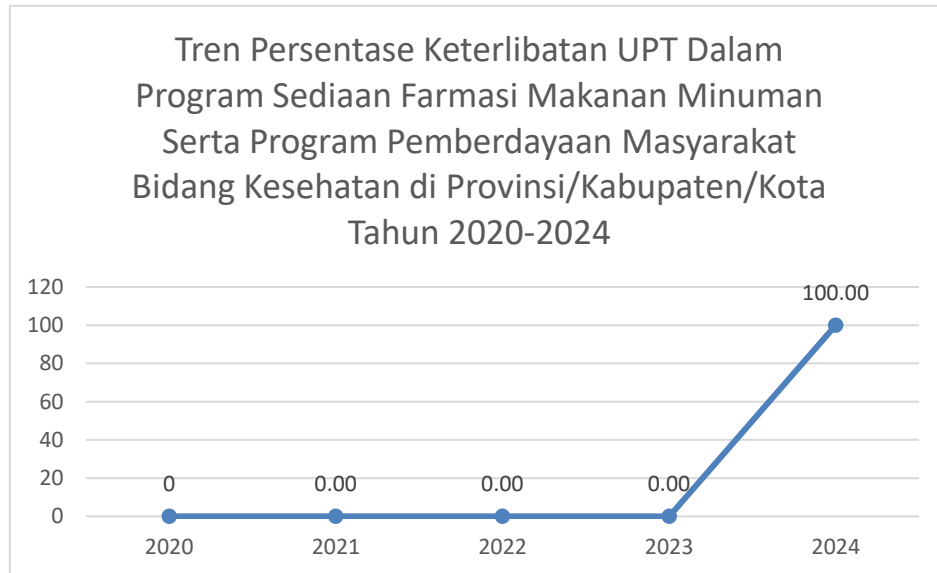
Gambar 1. 12 Tren Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020-2024

Peningkatan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan berhasil diperoleh dikarenakan pemeriksaan diprioritaskan kepada sarana yang terdapat temuan pada pemeriksaan tahun sebelumnya dan sarana yang belum pernah dilakukan pemeriksaan serta sarana baru sehingga terdapat peningkatan penilaian hasil pemeriksaan sarana. Peningkatan pembinaan dilakukan terhadap sarana distribusi dan memberikan surat Teguran/Peringatan kepada sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) serta berkoordinasi dengan lintas sektor di Kabupaten/Kota. Pendampingan kepada pelaku usaha dilakukan baik saat pemeriksaan berlangsung maupun saat konsultasi perbaikan CAPA, terutama untuk sarana yang baru terpapar dan belum pernah sama sekali diperiksa, sehingga terjadi peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang Cara Distribusi yang Baik.



Gambar 1. 13 Tren Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik Yang Baik Tahun 2020-2024

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik Yang Baik terendah pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan terdapatnya UMKM binaan yang tidak berhasil menyelesaikan seluruh tahapan proses sertifikasi pada tahun berjalan dikarenakan komitmen dari UMKM yang masih kurang untuk memenuhi seluruh persyaratan tepat waktu. Perbaikan secara berkesinambungan terus dilakukan melalui kunjungan prasertifikasi ke sarana produksi dan pendampingan penyusunan berkas sertifikasi maupun registrasi oleh petugas Loka POM di Kabupaten Buleleng baik secara langsung maupun secara virtual (melalui *zoom meeting* atau konsultasi *whatsapp*). Maupun pemberian informasi baik berupa Bimbingan Teknis maupun desk dalam rangka pendampingan UMKM Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik telah dilakukan kepada masing.



Gambar 1. 14 Tren Persentase Keterlibatan UPT Dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

Indikator Persentase Keterlibatan UPT Dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan indikator yang dilakukan penilaian di tahun 2024. Keberhasilan Persentase Keterlibatan UPT Dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota dikarenakan Loka POM di Kabupaten Buleleng berhasil tergabung dalam Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten Buleleng dan Jembrana, melaksanakan kegiatan dalam program penurunan stunting Bersama Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di Kabupaten Buleleng dan Jembrana, mendorong pelaksanaan program DAK non fisik di Kabupaten Jembrana. Seluruhnya didukung oleh terjalinnya koordinasi yang baik dengan lintas sektor yang terlibat dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten Buleleng dan Jembrana, melakukan pembinaan/pendampingan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM secara mandiri maupun terpadu;

monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, memverifikasi pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM yang diisi oleh Dinas Kesehatan melalui aplikasi *SMART* POM, serta mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK3 yaitu: a) koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring; b) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; c) melaporkan hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman; d) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan serta pemanfaatan DAK nonfisik daerah; e) menetapkan prioritas bersama lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan; f) mensosialisasikan kembali Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan pangan olahan kepada lintas sektor; g) pendampingan kepada pelaku usaha UMKM sediaan farmasi dan pangan olahan dalam proses pemenuhan sertifikasi sarana hingga memperoleh izin edar produk;

4. Sasaran Kegiatan (SK4) : Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan

Capaian sasaran Kegiatan diukur dengan indikator kinerja Tingkat efektivitas KIE.



Gambar 1. 15 Tren Persentase Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

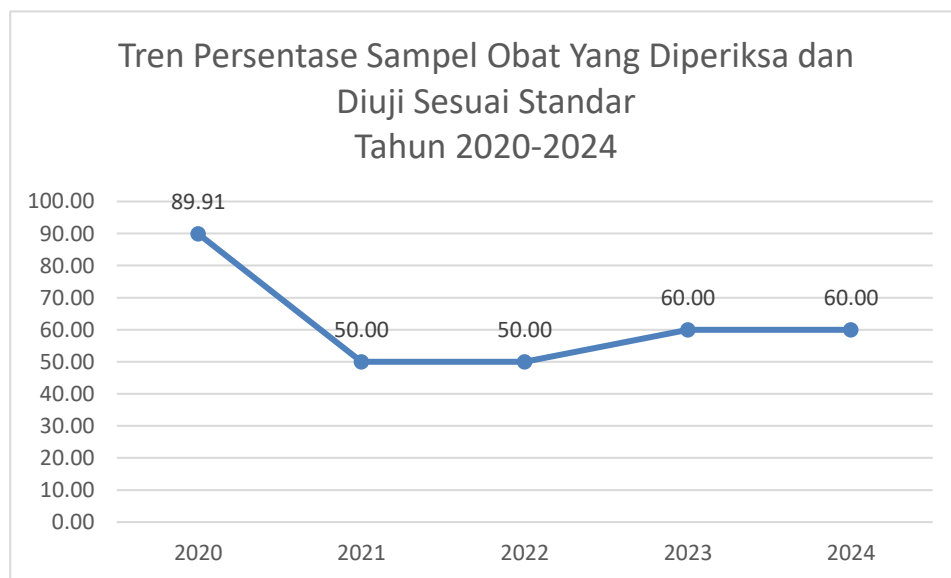
Tren Persentase Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima, penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE dan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan menunjukkan hasil yang sangat baik. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan diperoleh melalui pengukuran yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara manual maupun online kepada target responden sesuai dengan tools pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan pada saat kegiatan KIE. Peningkatan ini dikarenakan Loka POM di Kabupaten Buleleng terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan KIE terutama meningkatkan minat dari peserta terhadap KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng. Salah satunya adalah dengan menghadirkan narasumber eksternal yang kompeten dan *capable*. Kemasan dan media yang digunakan untuk KIE yang menarik menjadi aspek yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan sehingga dapat menarik minat masyarakat. Pemilihan materi yang tepat terhadap karakteristik dari peserta KIE juga perlu diperhatikan dan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan KIE secara

langsung sehingga tidak mengganggu aktivitas utama dari peserta KIE. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan dalam pemilihan media dan bentuk kegiatan KIE seperti melalui media elektronik dan program yang paling banyak dapat menjangkau minat masyarakat sehingga kegiatan KIE menjadi lebih efektif dan efisien.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK4 yaitu: peningkatan inovasi ragam kegiatan KIE baik secara kuantitas dan kualitas untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan sekaligus membangun kesadaran masyarakat.

5. Sasaran Kegiatan (SK5) : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan

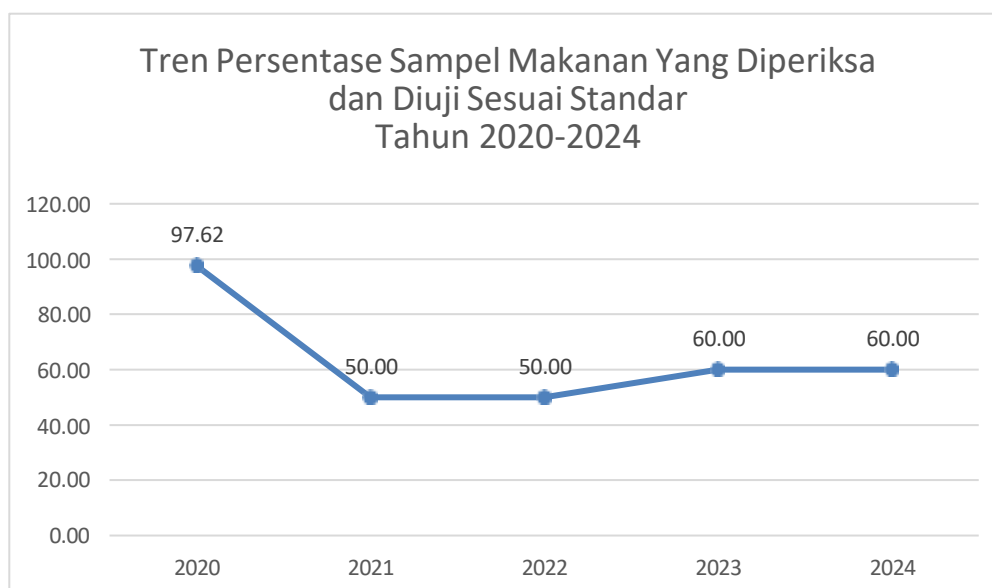
Capaian sasaran Kegiatan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut: (1) Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dan (2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.



Gambar 1. 16 Tren Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020-2024

Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar menunjukkan tren yang stagnan hal ini menunjukkan seluruh target sampel obat telah dilakukan pengawasan. Namun

untuk di Loka POM di Kabupaten Buleleng pengawasan hanya dilakukan terhadap label/penanda saja dikarenakan belum tersedianya fasilitas laboratorium pengujian sehingga uji laboratorium dilakukan di Balai Besar POM regional



Gambar 1. 17 Tren Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020-2024

Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar menunjukkan tren yang stagnan hal ini menunjukkan seluruh target sampel makanan telah dilakukan pengawasan. Namun untuk di Loka POM di Kabupaten Buleleng pengawasan hanya dilakukan terhadap label/penanda saja dikarenakan belum tersedianya fasilitas laboratorium pengujian sehingga uji laboratorium dilakukan di Balai Besar POM regional. Perencanaan yang tepat sesuai pedoman sampling dan kemampuan uji dari laboratorium menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK5 yaitu: a) evaluasi dan kajian strategi sampling dan pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan sehingga pengambilan sampel lebih representatif terhadap jumlah produk obat yang beredar; b) koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan

produk, serta pengawasan peredaran produk daring; c) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; d) melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat; e) melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman; f) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan.

6. Sasaran Kegiatan (SK6) : Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah.



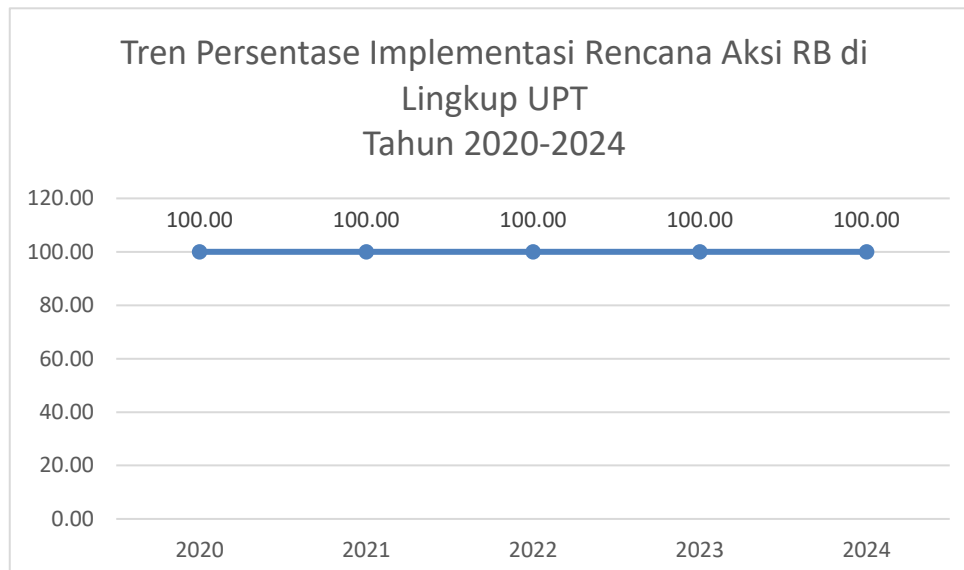
Gambar 1. 18 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan menjumlahkan nilai bobot setiap tahapan penyidikan yakni SPDP, Tahap I, P21 dan Tahap 2. Nilai terendah ditunjukkan pada tahun 2022. Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat keberhasilan proses penyidikan yaitu faktor tersangka yang kurang kooperatif, hubungan dengan lintas sektor CJS (*Criminal Justice System*), keakuratan informasi yang diperoleh.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK6 yaitu: a) advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan, berupa konsultasi dengan penasehat hukum/ jaksa dalam rangka penyelesaian perkara kepada UPT BPOM; b) perkuatan koordinasi lintas sektor CJS dengan berbagai kegiatan, seperti (i) FGD Perkuatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan (koordinasi lintas sektor); (ii) Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Sediaan farmasi dan pangan olahan; (iii) Pertemuan Peningkatan Kinerja, *Profesionalisme*, dan Koordinasi PPNS BPOM; c) penambahan jumlah PPNS BPOM dengan mengadakan pelatihan pembentukan PPNS.

7. Sasaran Kegiatan (SK7) : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama BPOM yang optimal

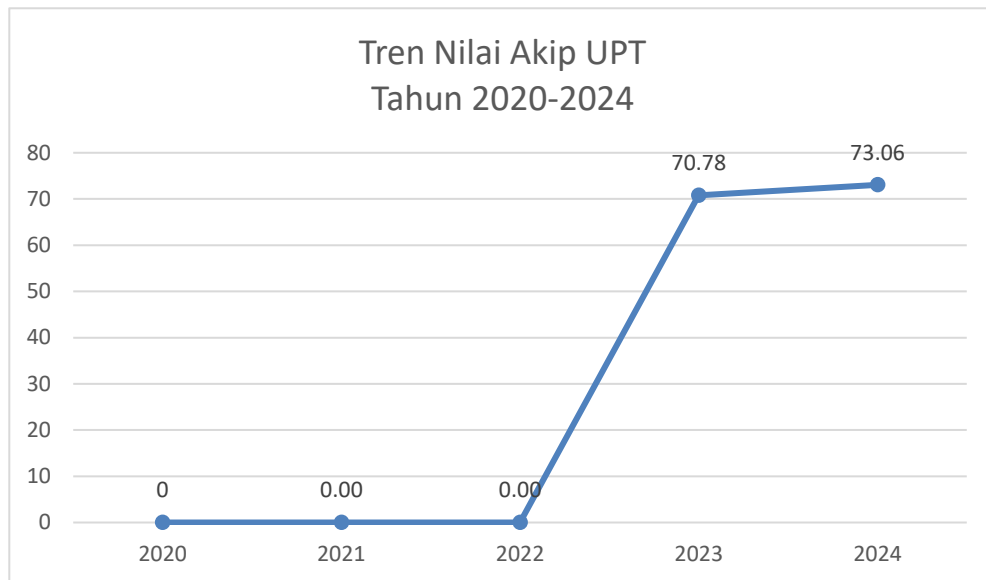
Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Sasaran kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Persentase implementasi rencana aksi RB; (2) Nilai AKIP UPT; (3) Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu; (4) Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu dan (5) Nilai Pengelolaan Kearsipan.



Gambar 1. 19 Tren Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT Tahun 2020-2024

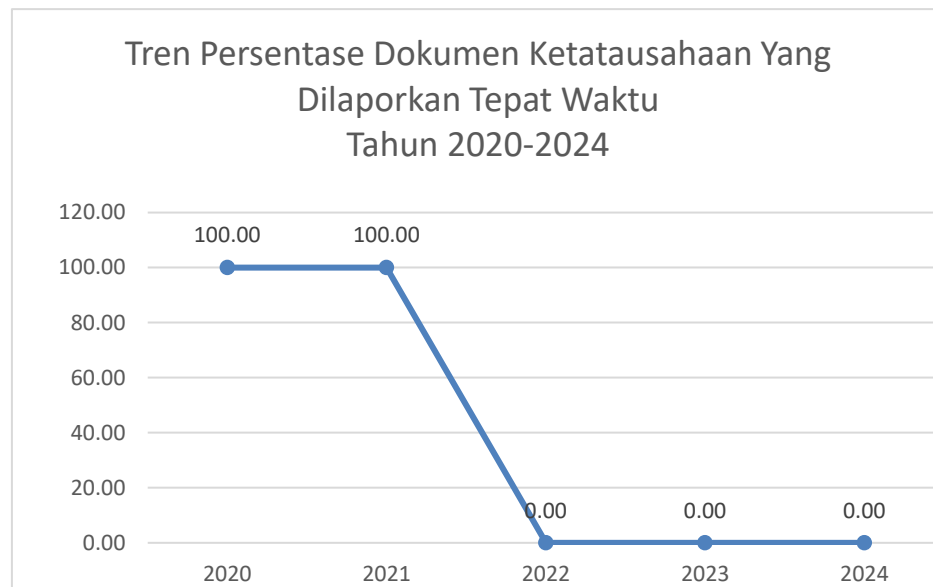
Implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT tahun 2024 sebanyak 7 (tujuh) rencana aksi yaitu: (1) Pengembangan Kompetensi, (2) Penetapan Kinerja Individu, (3) Perjanjian Kinerja, (4) Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan, (5) Pelaporan Gratifikasi, (6) Peningkatan Kepatuhan LHKPN, (7) Peningkatan Kepatuhan LHKASN.

Tercapainya seluruh rencana aksi RB sepanjang tahun 2020-2024 dikarenakan proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada rapat bulanan berjalan efektif.



Gambar 1. 20 Tren Nilai Akip UPT Tahun 2020-2024

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP. Penilaian AKIP mulai dilakukan pada tahun 2023. Tren yang meningkat menunjukkan pengelolaan SAKIP di Loka POM di Kabupaten Buleleng semakin baik dikarenakan perbaikan secara berkesinambungan yang dilakukan terhadap rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat BPOM.



Gambar 1. 21 Tren Persentase Dokumen Ketatausahaan Yang Dilaporkan Tepat Waktu Tahun 2020-2024

Persentase Dokumen Ketatausahaan Yang Dilaporkan Tepat Waktu dilakukan pengukuran pada tahun 2020-2021 sedangkan sejak tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Buleleng sudah menjadi satuan kerja mandiri dan tidak bergabung lagi dengan Balai Besar POM di Denpasar sebagai balai Pembina.



Gambar 1. 22 Tren Presentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu Tahun 2020-2024

Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu dilakukan pengukuran pada tahun 2020-2021 sedangkan sejak tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Buleleng sudah menjadi satuan kerja mandiri dan tidak bergabung lagi dengan Balai Besar POM di Denpasar sebagai balai Pembina.



Gambar 1. 23 Tren Persentase Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2020-2024

Pengukuran terhadap Persentase Nilai Pengelolaan Kearsipan dilakukan di Loka POM di Kabupaten Buleleng pada tahun 2024. Keberhasilan ini dikarenakan seluruh petugas pengelola arsip telah mengikuti pelatihan pengelolaan arsip melalui pelatihan langsung dari ANRI maupun diseminasi dari petugas lainnya sehingga petugas pengelola arsip mampu menjalankan pengelolaan arsip dengan mengacu pada tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan BPOM.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK7 yaitu: a) memastikan Rencana Aksi RB *General* relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama; b) menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP dari KemenPANRB; c) monev Rencana Aksi pengelolaan pengaduan dan melaksanakan

sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat; d) memastikan rencana aksi RB Tematik telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah; e) melakukan reviu dan perbaikan kerangka logis kinerja dengan menentukan kondisi/*outcome* atau kinerja yang akan diwujudkan dan CSF dari *outcome* tersebut, mulai dari kinerja strategis sampai kinerja operasional; f) penjajakan kerja sama dengan mitra kerja sama baru, implementasi kerja sama dengan mitra yang telah memiliki dokumen kerja sama, monitoring dan evaluasi kerja sama.

8. Sasaran Kegiatan (SK8) : Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur sasaran kegiatan ini digunakan indikator Indeks Profesionalitas ASN UPT.



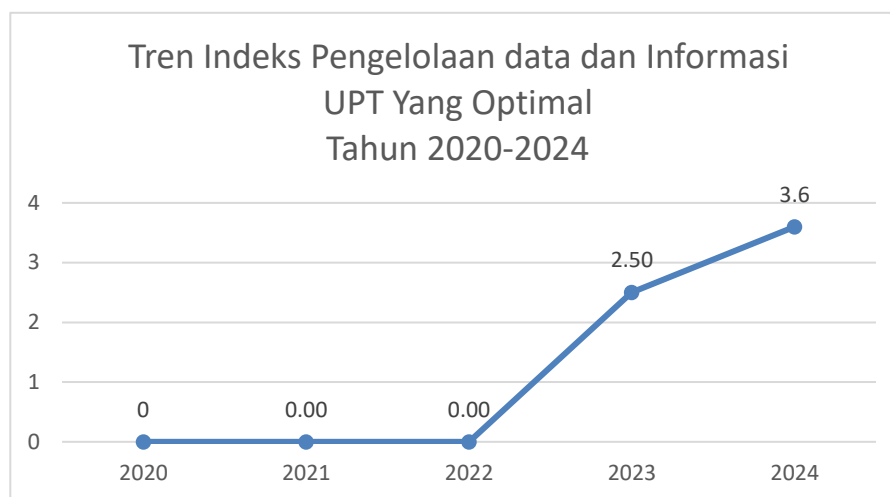
Gambar 1. 24 Tren Persentase Indeks Profesionalitas ASN UPT Tahun 2020-2024

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Peningkatan tren Persentase Indeks Profesionalitas ASN UPT Tahun 2020-2024 menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam melakukan pengelolaan SDM yang berkualitas melalui pemetaan dan peningkatan kompetensi, serta kedisiplinan pegawai sesuai yang tertuang pada Permen PAN dan RB.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK8 yaitu: a) pengembangan sistem untuk memonitoring capaian pegawai di unit kerja; b) menyusun panduan jenis diklat untuk mengatasi permasalahan dalam salah kategorisasi diklat yang *diinput* pegawai; c) melakukan pemetaan kompetensi ASN secara berkala, sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; d) Melaksanakan kegiatan *Feedback* Penilaian Kompetensi secara berkala per triwulan.

9. Sasaran Kegiatan (SK9) : Menguatnya laboratorium, analisis/kajian, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan Sediaan farmasi dan pangan olahan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Sediaan farmasi dan pangan olahan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Sasaran Kegiatan ini yang diukur menggunakan indikator yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.



Gambar 1. 25 Tren Indeks Pengelolaan data dan Informasi UPT Yang Optimal Tahun 2020-2024

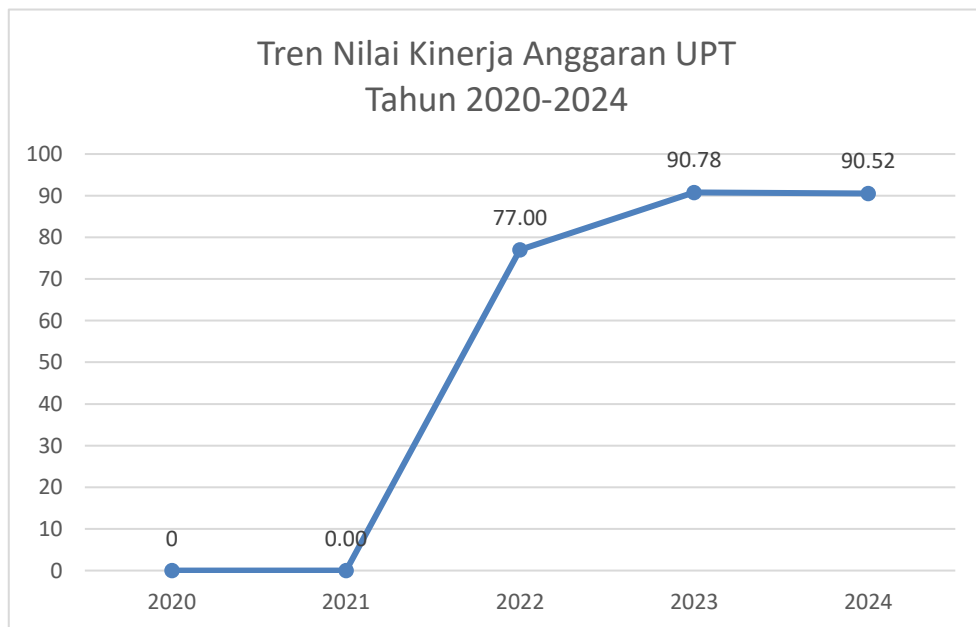
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT mulai dinilai di Loka POM di Kabupaten Buleleng pada tahun 2023. Nilai indeks yang meningkat dari tahun 2023-2024 menunjukkan pemanfaatan sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses Loka POM di Kabupaten Buleleng telah optimal. Pemanfaatan dashboard BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Menu dashboard unit terdiri dari Dashboard Biro Kerja Sama, Dashboard Hasil Pemeriksaan Sarana dan Pengujian, Dashboard Informasi Keamanan Sirup Obat, Dashboard Informasi Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan, Dashboard Kepegawaian Badan POM, 99 Dashboard Layanan Pengajuan Surat Keterangan Impor dan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan, Dashboard PNPB Badan POM, Dashboard Statistik Website Badan POM.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK9 yaitu melakukan optimalisasi pemanfaatan BOC serta penggunaan email BPOM.

10. Sasaran Kegiatan (SK10) : Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran kegiatan ini

bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Sasaran Kegiatan ini diukur menggunakan indikator: 1) Nilai Kinerja Anggaran BPOM; 2) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa; 3) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara; 4) Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri; dan 5) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT;



Gambar 1. 26 Tren Nilai Kinerja Anggaran UPT Tahun 2020-2024

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran mulai dilakukan pada tahun 2022 sejak Loka POM di Kabupaten Buleleng menjadi satuan kerja mandiri. Tren nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Buleleng terus meningkat mengindikasikan nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang semakin baik yaitu telah memenuhi target yang ditetapkan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala melalui Rapat Evaluasi yang rutin dilaksanakan setiap bulan.
2. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
3. Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran untuk beberapa kegiatan yang sudah

terlaksana namun masih terdapat sisa anggaran.



Gambar 1. 27 Tren Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2020-2024

Pengukuran Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dilakukan pada tahun 2024. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa sudah sangat baik walau belum mencapai nilai 100. Hal ini dikarenakan masih adanya penunggakan pembayaran THR karyawan outsourcing oleh penyedia sehingga tahapan penyelesaian paket di e-katalog belum diselesaikan 100% sebagai bentuk penilaian yang kurang terhadap kinerja dari penyedia *outsourcing*. Kegiatan yang menunjang keberhasilan diantaranya yaitu memaksimalkan RUP yang diumumkan dalam aplikasi SIRUP untuk tahun anggaran berikutnya, memaksimalkan proses pengadaan melalui *E-tendering*, menyelesaikan paket hingga status paket selesai 100% pada katalog elektronik, menerapkan proses non *E-tendering* dan *non e-purchasing* pada aplikasi SPSE, menyelesaikan e-kontrak pada aplikasi SPSE.



Gambar 1. 28 Tren Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2020-2024

Pengukuran Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan pada tahun 2024. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara Loka POM di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa seluruh aspek pengelolaan BMN meliputi Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sudah dikelola dengan sangat baik



Gambar 1. 29 Tren Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Pengukuran Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan pada tahun 2024. Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Loka POM di Kabupaten Buleleng sudah sangat baik. Keberhasilan ketercapaian indikator karena Loka POM di Kabupaten Buleleng terpebuhinya aspek penilaian yaitu Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Loka POM di Kabupaten Buleleng berupaya meningkatkan pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai produk dalam negeri untuk mendukung Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.



Gambar 1. 30 Tren Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT Tahun 2020-2024

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT Tahun 2020-2024 dilakukan pengukuran pada tahun 2020-2021 sedangkan sejak tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Buleleng sudah menjaduan satuan kerja mandiri dan tidak bergabung lagi dengan Balai Besar POM di Denpasar sebagai balai Pembina.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK10 yaitu: a) penyusunan Laporan Keuangan BPOM *Unaudited dan Audited*; b) tindak lanjut rekomendasi LHP BPK secara tepat waktu; c) meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran; serta d) pelaporan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat.

1.1.2. Aspirasi *Stakeholder*

Dalam menghadapi tantangan masa depan, BPOM memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu BPOM dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan BPOM untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, BPOM dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang *emergent*, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Aspirasi masyarakat juga membantu BPOM termasuk Loka POM di Kabupaten Buleleng hal ini penting agar BPOM dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini penting agar BPOM dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Buleleng 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia tidak hanya memenuhi standar global, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara khusus.

Sebagai salah satu pilar pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subyek dan sasaran program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Sistem pengawasan obat dan makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi obat dan makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam

pengawasan obat dan makanan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari obat dan makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyusun perencanaan program pengawasan obat dan makanan.

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2025 tidak diperoleh usulan/masukan/tanggapan dari peserta terhadap informasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh pihak Loka POM di Kabupaten Buleleng. Terdapat 6 (enam) orang peserta yang memberikan usulan maupun pertanyaan di luar materi tentang standar layanan informasi dan pengaduan. Dari hasil permasalahan yang disampaikan oleh peserta FKP, didapatkan bahwa:

1. *Stakeholder* mengharapkan waktu yang lebih singkat dalam pengelolaan pengaduan masyarakat;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan *standard*;
3. Adanya media komunikasi/konsultasi antara *stakeholder* dengan Loka POM di Kabupaten Buleleng diperluas.

Terhadap masalah/usulan yang muncul dalam kegiatan FKP, Loka POM di Kabupaten Buleleng akan melaksanakan kegiatan *review* dokumen standar layanan dengan peraturan-peraturan yang dapat dibijaksanai sehingga proses perizinan terus berjalan.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun Renstra Loka POM di Kabupaten Buleleng 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional.

Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, Loka POM di Kabupaten Buleleng dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan

yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Buleleng 2025-2029. Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu BPOM tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Loka POM di Kabupaten Buleleng menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Loka POM di Kabupaten Buleleng, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

1.2.1. Kekuatan (Strength)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki BPOM, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan BPOM keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan obat dan makanan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi BPOM di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh BPOM, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Komitmen kepemimpinan dan seluruh ASN yang kuat

Dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan dan keefektifan jangka panjang, kepemimpinan di Loka POM di Kabupaten Buleleng telah memperlihatkan komitmen yang kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan fokus pada pengawasan obat dan pangan ol yang aman dan berkualitas, kepemimpinan memastikan BPOM tidak hanya beradaptasi dengan tantangan saat ini tetapi juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa depan. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, kepemimpinan BPOM berusaha meningkatkan standar pengawasan, mendorong pengembangan metode baru, dan memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Komitmen yang kuat dari kepemimpinan Loka POM di Kabupaten Buleleng dan seluruh ASN menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan adaptif, yang vital dalam menumbuhkan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan pemenuhan fasilitas penunjang pekerjaan berupa peralatan kerja, ruangan untuk berdiskusi dan berkolaborasi (KAF31N!), serta kegiatan penunjang kesehatan (Hari Krida, Hari Olahraga dan Seni). Kepemimpinan yang efektif menanamkan nilai-nilai adaptabilitas dan keberlanjutan pada seluruh pegawai serta mempromosikan kolaborasi lintas sektor, dan mendorong pemanfaatan teknologi terkini dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Komitmen kepemimpinan Loka POM di Kabupaten Buleleng atas kolaborasi ditunjukkan dengan jumlah kerja sama aktif yang dibina sampai 2024 dengan Pemerintah daerah, OPD dan Institusi yang ada di Kabupaten Buleleng dan Jembrana, Organisasi serta Kelompok Masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng dan Jembrana.

2. Kerja Sama lintas sektor yang solid

Loka POM di Kabupaten Buleleng telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, Lembaga Pendidikan, Organisasi profesi, serta Kelompok masyarakat di Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan Loka POM di Kabupaten

Buleleng dalam mengawasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar. Melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder, Loka POM di Kabupaten Buleleng dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkannya tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal, memperkuat sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Loka POM di Kabupaten Buleleng dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru melalui hubungan kerja sama yang erat dengan industri, akademisi, dan lembaga organisasi profesi. Kolaborasi ini memungkinkan Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan.

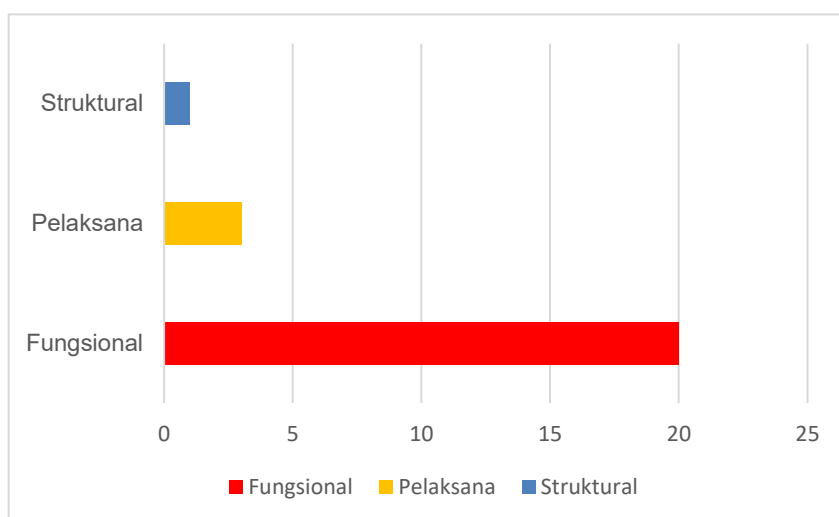
3. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM Loka POM di Kabupaten Buleleng

Loka POM di Kabupaten Buleleng didukung oleh para profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang modern, kualitas sumber daya manusia di Loka POM di Kabupaten Buleleng mencerminkan standar tinggi di bidangnya.

Pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM Loka POM di Kabupaten Buleleng merupakan aset penting dalam evaluasi dan pengawasan produk. SDM Loka POM di Kabupaten Buleleng terdiri dari ahli-ahli di berbagai bidang, yang mampu melakukan analisis ilmiah dan teknis yang komprehensif terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan. Untuk dapat melakukan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, dibutuhkan kompetensi teknis dengan kriteria spesifik sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi pada setiap jabatannya. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis spesifik tersebut, Loka POM di Kabupaten Buleleng memiliki 7 (tujuh) Jabatan Fungsional dengan kompetensi teknis maupun spesialisasi jabatan yang spesifik. Sampai dengan tahun 2024, 54% (lima puluh empat persen) dari pegawai tersebut merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, dengan spesialisasi pada fungsi pemeriksaan, spesialisasi fungsi penyuluhan, spesialisasi fungsi penindakan. Kompetensi teknis maupun spesialisasi tersebut sangat penting dalam mengidentifikasi risiko, menilai keamanan produk, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis bukti ilmiah. Tidak hanya Jabatan Fungsional Pengawas

Farmasi dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Buleleng juga didukung dengan 29% (dua puluh sembilan persen) Jabatan Fungsional lainnya seperti dibawah ini:

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Pengawas Farmasi dan Makanan	13
2	Perencana	1
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	2
4	Pranata Komputer	1
5	Pranata SDM	1
6	Arsiparis	1
7	Pranata Keuangan APBN	1



Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini mencerminkan bagaimana Loka POM di Kabupaten Buleleng secara proaktif dan responsif memperbarui standar dan metodologi pengawasannya untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis dan perkembangan sains dan teknologi. Dengan memastikan bahwa regulasi dan prosedur pengawasan selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri obat dan makanan, BPOM dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat, serta mendukung inovasi industri.

Loka POM di Kabupaten Buleleng meningkatkan kemampuan adaptasinya melalui pengembangan sumber daya manusia, penerapan teknologi terkini dalam pengawasan, serta memperkuat kolaborasi dengan lembaga dan pemangku kepentingan industri. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, tetapi juga memposisikan Loka POM di Kabupaten Buleleng sebagai lembaga yang tangguh dan dinamis, siap menghadapi tantangan masa depan. Kemampuan adaptasi ini membuktikan komitmen Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam melindungi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan industri, menjadikannya kekuatan penting dalam membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkelanjutan.

Pada periode 2020–2024, 19 (sembilan belas) orang SDM Loka POM di Kabupaten Buleleng telah mengikuti berbagai jenis pelatihan, yaitu Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional, serta Pelatihan Manajerial dan sosial kultural. Selain itu, SDM Loka POM di Kabupaten Buleleng juga mengikuti sosialisasi, workshop, seminar, bimbingan teknis, kursus dan lainnya yang mencakup pelatihan teknis pendukung tugas, penguatan kapasitas umum, serta internalisasi nilai-nilai organisasi. Secara khusus, sebesar 62,5% SDM Loka POM di Kabupaten Buleleng telah mengikuti pelatihan teknis berbasis kompetensi selama 2020-2025, termasuk pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan District Food Inspector Junior. Sebagai bentuk pengakuan profesional, hingga 31 Maret 2025, sebanyak 41,6% SDM Loka POM di Kabupaten Buleleng telah mengikuti sertifikasi kompetensi. Di samping itu, Loka POM di Kabupaten Buleleng juga memberikan dukungan untuk pengembangan akademik jangka panjang. Selama periode 2020-2024, sebanyak 3 (tiga) peserta tugas belajar dan 1 (satu) izin belajar jenjang S1 hingga S2 yang telah difasilitasi.

4. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif

Loka POM di Kabupaten Buleleng aktif dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dengan melaksanakan program dan kampanye edukasi yang terstruktur, Loka POM di Kabupaten Buleleng berupaya menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Keterlibatan ini memainkan peran strategis dalam menguatkan sistem pengawasan dari dalam, sambil

membangun kesadaran dan pemahaman luas mengenai pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, pendekatan edukasi dan pemberdayaan ini mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendukung inisiatif kesehatan publik, berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua.

Masyarakat merupakan satu elemen utama dalam sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng, tetapi juga mengukuhkan jaringan keamanan produk secara menyeluruh. Melalui edukasi dan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar sangat membantu BPOM dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko kesehatan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif. Kemitraan strategis ini antara masyarakat dan Loka POM di Kabupaten Buleleng merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan produk untuk kesejahteraan semua orang. Salah satu bentuk inovasi dalam pelaksanaan KIE dan Edukasi terhadap masyarakat adalah Jempiring (Jemput Bola Pelaku Usaha Berdaya Saing), Medelokan, dan Sekar Asih.

1.2.2. Kelemahan (Weakness)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang terus meningkat, Loka POM di Kabupaten Buleleng tidak lepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Loka POM di Kabupaten Buleleng menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) dan *Gap* kompetensi pegawai

Keterbatasan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Buleleng berdampak langsung pada kemampuan lembaga ini untuk menjalankan pengawasan obat dan makanan yang efektif dan menyeluruh, terutama dengan beban kerja serta wilayah yang luas dan beresiko dan kurang terjangkau. Hasil analisis beban kerja (ABK) sampai 2025 di Loka POM di Kabupaten Buleleng baru terpenuhi 75% (tujuh puluh lima persen). Kelemahan ini meningkatkan risiko terjadinya penundaan dalam inspeksi dan pengawasan produk, memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasaran. Selain itu, kurangnya jumlah SDM penunjang (Ketatausahaan) dalam membantu SDM teknis dalam melaksanakan tugas sangat berpengaruh dengan pergerakan pengawasan obat dan makanan di Loka POM di Kabupaten Buleleng. SDM teknis yang juga harus mengelola dan merangkap dalam mengerjakan proses administrasi membuat *workload* masing-masing orang menjadi bertambah yang akhirnya mempengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam melakukan pekerjaan teknis. Dampak kelemahan ini tidak hanya terbatas pada operasional internal Loka POM di Kabupaten Buleleng, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi dalam mengatasi jumlah tantangan dan distribusi SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik.

Kesenjangan kompetensi di antara pegawai di Loka POM di Kabupaten Buleleng menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan efektivitas lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dari 7 (tujuh) orang yang telah mengikuti pelatihan penyuluh keamanan pangan (PKP) hanya 2 (dua) orang yang telah tersertifikasi. Ketidakseimbangan ini menciptakan inefisiensi dalam alur kerja, di mana sebagian pegawai mungkin merasa kelebihan beban sementara lainnya kurang dimanfaatkan. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan di antara staf tetapi juga menurunkan kinerja keseluruhan, karena tugas-tugas kritis mungkin tidak diselesaikan dengan standar yang diperlukan atau dalam waktu yang tepat. Kesenjangan kemampuan ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas dan konsistensi prosedur pengawasan yang harus dijalankan dengan presisi. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan kompetensi antar pegawai

dapat mengancam kemampuan BPOM untuk menjaga standar keamanan obat dan makanan. Tugas-tugas pengawasan memerlukan pemahaman mendalam dan keahlian yang seragam di seluruh organisasi untuk memastikan bahwa semua regulasi dan standar dipatuhi dengan baik. Tanpa adanya level kompetensi yang setara di antara staf, BPOM berisiko mengalami kerentanan dalam proses pengawasan, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan publik. Oleh karena itu, menjembatani kesenjangan kompetensi melalui pelatihan yang seragam dan berkelanjutan adalah kunci untuk mempertahankan keandalan dan integritas lembaga pengawas ini.

2. Infrastruktur Pelayanan Publik yang Belum Memadai

Belum adanya gedung kantor permanen sebagai penunjang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng menjadi salah satu kelemahan yang sampai saat ini belum mendapatkan solusi. Selain itu, dengan belum adanya gedung kantor yang permanen membuat terkendalanya proses pengujian sederhana sediaan farmasi dan pangan olahan yang menjadi kewajiban dalam pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Gedung kantor yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng yang masih sewa menjadi kelemahan yang signifikan dalam proses pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng. Keterbatasan dalam melakukan penambahan fasilitas pelayanan publik yang memadai memberikan batasan dalam melakukan pemberian pelayanan publik yang memadai. Laboratorium yang dimiliki menjadi tidak efektif sehingga memberikan keterbatasan dalam analisis yang kompleks atau sensitif, mengurangi kemampuan untuk mengidentifikasi kontaminan dan memverifikasi keamanan produk. Tidak semua produk mungkin diperiksa dengan standar pengujian yang sama ketatnya sehingga tidak terdeteksi adanya potensi bahaya terhadap kesehatan masyarakat.

3. Kapabilitas Laboratorium di Loka POM Kabupaten Buleleng yang Belum Memadai

Loka POM di Kabupaten Buleleng belum memiliki kapabilitas laboratorium yang memadai untuk pelaksanaan pengujian sederhana yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja Kabupaten Buleleng dan Jemberana. Hingga saat ini Loka POM di Kabupaten Buleleng hanya sanggup untuk

melakukan pengujian sederhana terhadap bahan berbahaya pada pangan menggunakan rapid test kit untuk parameter *Rhodamine B*, *Metanyl Yellow*, Boraks, dan Formalin. Pengujian sampel dalam rangka sampling pengawasan peredaran produk obat dan makanan dilakukan di laboratorium Balai Besar/Balai POM di Regional Surabaya. Kelemahan ini menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan kemampuan uji secara bertahap sesuai dengan pemenuhan Standar Peralatan dan pemenuhan Standar Kompetensi Penguji Laboratorium melalui penilaian Standar Kemampuan Laboratorium.

1.2.3. Peluang (Opportunity)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Sediaan farmasi dan pangan olahan:

1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng

Pasar produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Kabupaten Buleleng dan Jembrana secara khusus dan wilayah Bali pada umumnya yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang bagi Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, Loka POM di Kabupaten Buleleng berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen lokal kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil. Meningkatnya industri pariwisata di wilayah Provinsi Bali menjadi sebuah keuntungan bagi Loka POM di Kabupaten Buleleng, pertumbuhan ini

memberi Loka POM di Kabupaten Buleleng kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi industri lokal di panggung internasional. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, Loka POM di Kabupaten Buleleng dapat membantu produk lokal memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status Indonesia sebagai eksportir produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang terpercaya.

Loka POM di Kabupaten Buleleng memiliki peran strategis dalam memfasilitasi peningkatan daya saing industri sediaan farmasi dan pangan olahan dalam negeri di pasar internasional. Melalui penerapan standar produksi yang ketat, seperti *Good Manufacturing Practice* (GMP), Loka POM di Kabupaten Buleleng dapat mendorong industri lokal untuk tidak hanya memenuhi tetapi melebihi standar internasional. Langkah ini mencakup pelatihan terstruktur, transfer pengetahuan, dan dukungan teknis untuk produsen lokal agar mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi, manajemen kualitas, dan keamanan produk. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Buleleng dapat berperan aktif dalam mendorong UMKM agar memiliki daya saing yang lebih dan memberikan nilai ekonomi terhadap masyarakat Bali khususnya dalam wilayah Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Dengan demikian, Loka POM di Kabupaten Buleleng tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator dalam peningkatan kualitas industri sediaan farmasi dan pangan olahan, membantu mereka untuk bersaing lebih efektif di pasar global dan menembus pasar ekspor yang lebih luas.

2. Perkembangan Teknologi yang Pesat

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dengan meningkatnya penggunaan sistem digitalisasi secara global khususnya juga di Indonesia membutuhkan kecepatan beradaptasi dari Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, Loka POM di Kabupaten Buleleng dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Hal ini dapat

memperkuat kepercayaan publik dan keandalan lembaga. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat.

Peluang Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas. Salah satu bentuk adaptasi dalam penggunaan teknologi dalam membantu pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Loka POM di Kabupaten Buleleng adalah *website* data yang mengintegrasikan data-data pengawasan sekaligus data administratif dengan nama Mastersave. Peluang dalam pengembangan lebih lanjut terhadap web yang dimiliki sangat terbuka lebar sehingga pengawasan dan regulasi menjadi lebih efektif dan efisien.

3. Peningkatan kesadaran masyarakat

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan, Loka POM di Kabupaten Buleleng memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan berbagai segmen masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, Loka POM di Kabupaten Buleleng dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan pangan dan obat, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan

kerjasama dan kepercayaan antara Loka POM di Kabupaten Buleleng dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan pangan dan obat yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi Loka POM di Kabupaten Buleleng sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

4. Kebijakan kesehatan global dan perdagangan bebas

Di era globalisasi dan meningkatnya integrasi ekonomi melalui perjanjian perdagangan bebas, Loka POM di Kabupaten Buleleng menghadapi peluang signifikan untuk meningkatkan peran dan pengaruhnya di dunia industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Peningkatan kualitas UMKM sediaan farmasi dan pangan olahan yang ada di Kabupaten Buleleng dan Jembrana memungkinkan Loka POM di Kabupaten Buleleng secara efektif memastikan keamanan, efikasi, dan kualitas produk pangan dan obat yang beredar di dalam negeri tetapi juga memperkuat posisi produk lokal dalam persaingan global. Perkuatan ini menuntut upaya kolaboratif dengan berbagai stakeholder, termasuk industri, asosiasi perdagangan, dan lembaga masyarakat, untuk memastikan bahwa produk dalam negeri memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan yang diakui secara global.

Dari sudut pandang strategis, kebijakan ini tidak hanya berpotensi meningkatkan ekspor dan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen di dalam negeri. Dengan standar yang harmonis, konsumen Indonesia mendapatkan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi adalah produk yang aman dan berkualitas, sejalan dengan standar internasional. Ini juga memberikan tekanan positif kepada produsen dalam negeri untuk meningkatkan standar produksi mereka, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

5. Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan

Inovasi produk dan layanan kesehatan membuka peluang besar bagi Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk memainkan peran sentral dalam mendorong inovasi dan keamanan

produk di industri kesehatan di Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Dengan kemunculan UMKM dengan berbagai produk inovatif, obat bahan alam, bahan kosmetik baru dan makanan fungsional, Loka POM di Kabupaten Buleleng berada dalam keunggulan strategis untuk memimpin dalam pengembangan dan penerapan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif. Hal ini termasuk memastikan bahwa semua produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan efikasi yang ketat. Selain dengan melakukan pendekatan pengawasan sebelum produk beredar, Loka POM di Kabupaten Buleleng juga turut serta menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui pengawasan secara post market seperti dalam pelaksanaan sampling produk beredar dan pengawasan sarana produksi dan distribusi. Peluang ini juga memungkinkan Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam kesehatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi industri kesehatan. Dengan mengambil peran aktif dalam mendukung inovasi, Loka POM di Kabupaten Buleleng tidak hanya memastikan akses masyarakat terhadap terapi dan produk kesehatan terbaru tetapi juga membuka jalan bagi ekspor produk kesehatan Indonesia yang memenuhi standar internasional. Dengan demikian, fokus pada pengembangan dan penerapan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif tidak hanya menguntungkan kesehatan publik tetapi juga menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

1.2.4. Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Loka POM di Kabupaten Buleleng. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga Loka POM di Kabupaten Buleleng dapat merancang langkah- langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan

transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan sediaan farmasi dan pangan olahannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapanpun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap *platform e-commerce* berlomba-lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh BPOM. Beberapa *platform* seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem *user generated content* (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada *platform e-commerce*. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat.

Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam upaya menjaga keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar luas di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia dan menyebar di wilayah Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko

kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui *e-commerce*. Dengan demikian, Loka POM di Kabupaten Buleleng dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber sediaan farmasi dan pangan olahan di era digital.

2. Dinamika pasar yang cepat

Dinamika pasar yang cepat dalam industri sediaan farmasi dan pangan olahan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk terus *update* pengetahuan bagi petugas dan metodologi pengawasan yang tepat sasaran. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen.

Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum sepenuhnya dievaluasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam menjaga keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.

3. Krisis kesehatan global

Krisis kesehatan global, seperti pandemi, merupakan salah satu ancaman paling signifikan yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam konteks analisis SWOT. Krisis semacam ini tidak hanya menguji kapasitas Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam mengelola risiko terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga memerlukan lembaga ini untuk

bertindak dengan respons yang cepat dan efektif menghadapi kondisi yang berubah dengan cepat. Dalam situasi pandemi, misalnya, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengawasi obat-obatan serta vaksin baru dengan proses yang lebih cepat dari biasanya, tanpa mengorbankan standar keamanan dan efikasi yang ketat. Hal ini menuntut Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk memiliki sistem yang fleksibel dan adaptif, serta kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk mengatasi prioritas yang berubah-ubah.

Selain itu, krisis kesehatan global dapat meningkatkan risiko terhadap distribusi dan akses terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, memaksa Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk mengatasi tantangan logistik dan pemantauan pasar yang lebih kompleks. Misalnya, peningkatan permintaan terhadap obat-obatan tertentu atau alat kesehatan dapat memicu risiko penyalahgunaan, penimbunan, atau distribusi produk palsu yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Krisis seperti ini juga menuntut Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan komunikasi publiknya, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan dan menginformasikan tentang langkah-langkah keamanan yang tepat. Menghadapi krisis kesehatan global memerlukan koordinasi yang erat tidak hanya di dalam organisasi tetapi juga dengan lembaga kesehatan lainnya. Krisis kesehatan global menyoroti pentingnya kemampuan Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk beradaptasi dengan situasi darurat, menjadikannya salah satu ancaman utama yang harus dikelola dalam strategi lembaga.

4. Akselerasi perkembangan teknologi

Inovasi produk baru terkadang dapat bertentangan dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena produk baru sering kali mengandung komponen atau mekanisme kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Tantangan ini tidak hanya terletak pada aspek keamanan dan efikasi produk, tetapi juga pada kecepatan di mana Loka POM di Kabupaten Buleleng harus bereaksi untuk memperbarui dan menyesuaikan regulasi dan metodologi pengujian untuk menjaga standar keamanan tanpa menghambat inovasi.

Ancaman yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam konteks ini mencakup

risiko keamanan publik akibat keterlambatan dalam merespons produk baru, potensi ketidakpastian di kalangan konsumen mengenai keamanan produk, dan kesulitan dalam memprediksi implikasi jangka panjang dari teknologi baru terhadap kesehatan dan keselamatan. Selain itu, kemampuan Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam memastikan kepatuhan industri terhadap regulasi baru menjadi semakin kompleks, mengingat sifat inovatif dari produk yang mungkin memerlukan pendekatan pengawasan yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Ancaman ini memperjelas kebutuhan mendesak untuk sistem regulasi yang tidak hanya adaptif dan fleksibel tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan manfaat teknologi baru secara efektif dan efisien, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi

Dalam konteks pasar yang dinamis, kejadian kontaminasi, baik itu disengaja atau tidak, serta peredaran produk palsu, mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat. Risiko ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan bagi konsumen tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar sediaan farmasi dan pangan olahan. Kepercayaan tersebut merupakan aset penting yang mempengaruhi efektivitas Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam menjalankan perannya sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan. Ancaman dari kontaminasi dan falsifikasi ini semakin diperumit oleh kompleksitas rantai pasok global, di mana produk dan bahan baku melewati berbagai tahapan produksi dan distribusi.

Ketidakjelasan dalam rantai pasok ini meningkatkan kesulitan dalam melacak sumber kontaminasi atau asal-usul produk palsu. Selain itu, kemajuan teknologi juga memudahkan pelaku untuk memalsukan produk dengan cara yang semakin canggih, membuat deteksi oleh pihak pengawas menjadi lebih kompleks. Dengan demikian, risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menuntut vigilansi yang terus menerus dan pengawasan yang lebih ketat oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk menjaga keamanan produk dan melindungi kesehatan masyarakat.

6. Perubahan demografi dan epidemiologi

Dinamika populasi, termasuk penambahan usia rata-rata, pertumbuhan populasi, dan

pergeseran pola penyakit, secara signifikan mempengaruhi jenis dan jumlah produk obat serta makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, penuaan populasi (*ageing population*) dapat meningkatkan permintaan terhadap obat-obatan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan kronis, sedangkan perubahan pola penyakit, seperti meningkatnya prevalensi diabetes atau penyakit jantung, memerlukan penyesuaian dalam pengawasan produk makanan dan obat-obatan yang beredar di pasaran.

Ancaman ini menggarisbawahi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam menyesuaikan prioritas pengawasan untuk menjawab kebutuhan yang berubah-ubah tersebut. Kebutuhan untuk memonitor dan mengatur produk baru atau yang sudah ada menjadi lebih kompleks seiring dengan pergeseran kebutuhan masyarakat. Selain itu, perubahan epidemiologi, seperti munculnya penyakit menular baru atau kebangkitan penyakit yang sebelumnya terkendali, menuntut respons yang cepat dan adaptif dari Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan terkini tentang tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa pengawasan Loka POM di Kabupaten Buleleng tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan publik di tengah dinamika yang terus berubah.

7. Resistensi Antimikroba

Ancaman bioterorisme, yang mencakup risiko penggunaan produk sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai medium untuk aksi bioterorisme, merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng. Ancaman ini menggarisbawahi perlunya sistem pengawasan dan deteksi yang canggih dan efektif untuk mengidentifikasi serta mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan kesehatan masyarakat. Bioterrorisme dapat mengancam tidak hanya kesehatan individu melalui paparan terhadap agen patogenik, tetapi juga dapat menimbulkan kepanikan dan ketidakpercayaan publik terhadap keamanan pasokan makanan dan obat-obatan.

Dalam menghadapi ancaman ini, Loka POM di Kabupaten Buleleng dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat kerangka kerja pengawasan, termasuk penambahan laboratorium untuk pengujian patogen secara cepat dan akurat. Ancaman bioterorisme membutuhkan koordinasi lintas sektor dan kerjasama internasional untuk pertukaran

informasi dan praktek terbaik dalam deteksi dini dan respons terhadap ancaman. Keterbatasan dalam teknologi deteksi dan sistem pemantauan yang ada dapat meningkatkan kerentanan terhadap aksi bioterorisme, menuntut peningkatan kewaspadaan dalam teknologi pengawasan dan pengembangan protokol respons yang efektif. Tanpa pengawasan yang adekuat, risiko bioterorisme dapat mengancam integritas sistem kesehatan publik dan kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan.

8. Risiko insiden KLB Keracunan Pangan

Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan dapat terjadi akibat kontaminasi dari pengolahan pangan yang tidak higienis, penyimpanan atau penanganan pangan yang tidak sesuai standar. Insiden KLB Keracunan Pangan ini dapat memberikan dampak ancaman kesehatan bagi masyarakat bahkan dapat menyebabkan kematian. Ancaman peningkatan insiden KLB keracunan pangan dapat terjadi baik dari lingkup rumah tangga, industri catering, adanya Program MBG yang berskala nasional, hingga pangan produksi industri yang telah memiliki izin edar BPOM. Oleh karena itu Loka POM di Kabupaten Buleleng memiliki peran untuk mengawal keamanan dan mutu pangan melalui edukasi dan pengawasan yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis risiko.

Tabel 1. 2 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

<i>Strenght</i>	<i>Weakness</i>
1. Komitmen kepemimpinan dan seluruh ASN yang kuat 2. Kerja Sama lintas sektor yang solid 3. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM Loka POM di Kabupaten Buleleng 4. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif	1. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) 2. Infrsastruktur Pelayanan Publik yang Belum Memadai 3. Kapabilitas Laboratorium di Loka POM Kabupaten Buleleng yang Belum Memadai
<i>Opportunities</i>	<i>Threats</i>
1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan	1. <i>E-commerce</i> dan kejahatan siber di

Daya Saing Industri/Produk Sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng; 2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis Loka POM di Kabupaten Buleleng; 3. Peningkatan kesadaran masyarakat; 4. Kebijakan kesehatan global dan perdagangan bebas; 5. Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan.	bidang sediaan farmasi dan pangan olahan; 2. Dinamika pasar yang cepat; 3. Krisis kesehatan global; 4. Akselerasi Perkembangan Produk Obat dan Makanan; 5. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi; 6. Perubahan demografi dan epidemiologi; 7. Resistensi antimikroba; 8. Risiko insiden KLB keracunan pangan.
--	--

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

2.1. Visi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi Loka POM di Kabupaten Buleleng sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi Loka POM di Kabupaten Buleleng bersama BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi termasuk di Loka POM di Kabupaten Buleleng. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

- 1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
- 3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
- 4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Loka POM di Kabupaten Buleleng telah merumuskan misi yang sejalan dengan rumusan misi BPOM yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada

gambar berikut:



Gambar 2. 1 Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat**

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di

masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia nyata, termasuk pelaku UMKM dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang ada pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel,

transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

2.3. Tujuan BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi.

Loka POM di Kabupaten Buleleng sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM, yaitu:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2. 1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74,75	76,4	77,75	79,45	80,7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,20	88,60	88,90	89,20	89,40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63,6	66,2	69,3	72,7	76,7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	Indeks Efektivitas Penegakkan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	74,4	75,9	77,1	78,5	79,9

	Olahan	Olahan					
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96,3	96,35	96,4	96,45	96,5

2.4. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Buleleng, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Buleleng dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makna Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO;

- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*;
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan;
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar;
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT;
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium;
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman;
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 2: Meningkatnya efektivitas KIE:

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan

pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT;
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
- c. Jumlah desa pangan aman;
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

SK 3: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 4: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 5: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 6: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 7: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang

profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai AKIP;
- b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM;
- c. Indeks Manajemen Risiko;
- d. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Tabel 2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Loka POM di Kabupaten Buleleng periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu. Indikator: <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu;</i> <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025);</i> <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029);</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Indikator: <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;</i> <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO;</i> <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;</i> <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan</i>

		4. <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;</i> 5. <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;</i> 6. <i>Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</i>	<i>yang diuji sesuai standar;</i> 5. <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;</i> 6. <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder;</i> 7. <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;</i> 8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;</i> 9. <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;</i> 10. <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai</i>
--	--	---	---

			<i>ketentuan;</i> <i>11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan;</i> <i>12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar;</i> <i>13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT;</i> <i>14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium;</i> <i>15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman;</i> <i>16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029).</i>
--	--	--	--

	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT. Indikator: <i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i>
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Indikator: <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam	Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM Indikator: <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	Indikator: <i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap</i>	Meningkatnya Efektivitas KIE Indikator: <i>1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT;</i>

pemangku kepentingan	Indikator: <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	<i>Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan; 3. Jumlah desa pangan aman; 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif, dan Efisien serta Layanan	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	Layanan Publik UPT yang Prima Indikator: <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i>

pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Publik yang Prima Indikator: <i>Indeks RB POM</i>	Indikator: <i>Indeks RB POM</i>	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal Indikator: 1. <i>Nilai AKIP UPT BPOM ;</i> 2. <i>Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM;</i> 3. <i>Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM;</i> 4. <i>Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT;</i>
---	---	--	---

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Buleleng 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi risiko sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Loka POM di Kabupaten Buleleng

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Kesulitan dalam pengambilan sampel Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang sesuai secara kategori dan jumlah dikarenakan terdapat ketentuan umum agar produk yang telah disampling pada 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya dengan hasil Memenuhi Syarat (MS) tidak disampling kembali di Tahun Anggaran berjalan dalam Pedoman Sampling.	Melakukan pendataan sampel dan pemetaan sarana distribusi yang sudah disampling pada tahun sebelumnya dan melakukan sosialisasi data tersebut kepada petugas	Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng
		Rendahnya respon dari pelaku usaha dalam mengirimkan laporan perbaikan/CAPA	Membuat Data monitoring rekapitulasi CAPA pelaku usaha yang belum di TL	Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng

2	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Sarana yang menjadi target operasi tutup/pindah	Melakukan penelusuran kepada sarana yang menjadi target operasi secara intensif	Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng
		Petugas mendapatkan informasi yang tidak valid	Melakukan penelusuran terhadap sumber informasi (informan) dan informasi yang diberikan	Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Pelaku usaha tidak menepati timeline pelaksana pendampingan UMKM yang telah disepakati	Membuat surat Pernyataan Komitmen tertulis yang dibuat oleh Pelaku Usaha	Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng
4	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja	Informasi bocor dari <i>driver</i> yang digunakan saat bertugas	Menggunakan tools intelijen (<i>driver</i>) yang dapat diandalkan.	Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng
		Peserta undangan tidak menghadiri undangan penggalangan	Menyebarkan <i>link bitly</i> konfirmasi kehadiran kepada peserta undangan.	Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng

		Target operasi menyembunyikan barang bukti pada sarana dan mengganti modus operandi menjadi tertutup	Melakukan pendekatan dan penelusuran secara intens terhadap target operasi	Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Sediaan farmasi dan pangan olahan di masing-masing wilayah kerja UPT	Peserta KIE yang hadir tidak sesuai dengan target sasaran	Menyampaikan kriteria peserta KIE pada surat undangan	Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng
		Tools kuesioner efektivitas KIE tidak mudah dipahami oleh responden	Melakukan pendampingan kepada responden dalam pengisian kuesioner efektivitas KIE	Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng
		Kecelakaan kerja saat perjalanan pelaksanaan KIE	Memastikan pegawai yang bertugas dalam kondisi sehat	Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng
6	Layanan Publik UPT yang prima	Kepatuhan pelaku usaha produsen pangan olahan yang sudah memiliki NIE terhadap kewajiban memiliki sertifikat IP CPPOB.	Melakukan sosialisasi dan pembinaan	Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Keterlambatan penyetoran pajak	Melakukan diseminasi pajak kepada seluruh pegawai teknis	Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng
		Persediaan pengujian kedaluwarsa masih tersimpan di gudang dan belum dipisahkan dari persediaan	Melakukan stock opname persediaan pengujian	Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng

		pengujian yang masih layak pakai		Buleleng
		BMN belum terkelola secara optimal	Melakukan Update DBR	Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG:

Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*:

Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.

3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukunganyang kuat terhadap UMKM:

BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk- produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya

saing, dan memperluas akses pasar.

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.

5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin

keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *pre market* dan *post market* Sediaan farmasi dan pangan olahan yang termasuk Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM, dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Buleleng

Arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kabupaten Buleleng mendukung dan mengacu pada seluruh Arah Kebijakan dan Strategi BPOM. Untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Buleleng Periode 2025-2029, ditentukan arah dan strategi sebagai berikut:

3.2.1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Buleleng:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG;
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*;
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukunganyang kuat terhadap UMKM;
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan,dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

3.2.2. Strategi Loka POM di Kabupaten Buleleng

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kabupaten Buleleng

melakukan Analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* sediaan farmasi dan pangan olahan melalui analisis berbasis risiko dan pemanfaatan sistem yang terintegrasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG.;
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif maupun dengan mengedepankan strategi kolaborasi bersama dengan lintas sektor dan partisipasi public melalui layanan pengaduan.;
3. Memperluas layanan *regulatory assistance* dengan membangun ekosistem pendukung melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas koperasi & UMKM, perguruan tinggi, dan Lembaga pendamping pelaku usaha dengan memperluas layanan *regulatory assistance*;
4. Penguatan partisipasi publik dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui peningkatan literasi dan edukasi publik terkait sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu;
5. Penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dengan mengembangkan forum koordinasi untuk memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah, industri, akademisi dan organisasi masyarakat serta organisasi profesi di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;
6. Penguatan pengelolaan SDM, peningkatan kualitas pengujian, pengoptimalan pemanfaatan TIK yang modern serta penguatan sistem analisis risiko melalui sistem pengawasan intern;
7. Peningkatan kapasitas manajerial SDM, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui standarisasi SOP Pelayanan, penanganan keluhan dan survei kepuasan pengguna layanan.

Tabel 3. 1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Buleleng 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG	Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> sediaan farmasi dan pangan olahan melalui analisis berbasis risiko dan pemanfaatan sistem yang terintegrasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i>	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif maupun dengan mengedepankan strategi kolaborasi bersama dengan lintas sektor dan partisipasi public melalui layanan pengaduan.
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukunganyang kuat terhadap UMKM	Memperluas layanan <i>regulatory assistance</i> dengan membangun ekosistem pendukung melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas koperasi & UMKM, perguruan tinggi, dan Lembaga pendamping pelaku usaha dengan memperluas layanan <i>regulatory assistance</i>
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan partisipasi publik dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui peningkatan literasi dan edukasi publik terkait sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu

Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dengan mengembangkan forum koordinasi untuk memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah, industri, akademisi dan organisasi masyarakat serta organisasi profesi di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM, peningkatan kualitas pengujian, pengoptimalan pemanfaatan TIK yang modern serta penguatan sistem analisis risiko melalui sistem pengawasan intern
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan kapasitas manajerial SDM, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui standarisasi SOP Pelayanan, penanganan keluhan dan survei kepuasan pengguna layanan.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kabupaten Buleleng juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial. Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi diatas, Loka POM di Kabupaten Buleleng melaksanakan kegiatan:

A. Pengawasan Obat dan Makanan Diseluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng mencakup pengawasan *pre dan post* market sediaan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis, namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor.

Hal yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM di Kabupaten Buleleng tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi juga terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

B. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Dalam upaya untuk memastikan ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, dilakukan berbagai kegiatan prioritas, dimana kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di Loka POM di Kabupaten Buleleng.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BPOM untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan BPOM dalam memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran kegiatan yang mencerminkan visi BPOM, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih BPOM selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama BPOM, yaitu memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, seluruh unit kerja di BPOM diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi. Adapun matriks kinerja Loka POM di Kabupaten Buleleng 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Matriks Kinerja Loka POM di Kabupaten Buleleng 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,25	87,25	88.75	90,00	91,25
		Persentase fasilitas	0	27	28	29	30

	Olahan	pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO					
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91	92	93	94
		Persentase Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	87,5	89	90,5	92
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan	91	92	93	94	95

		ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,07	89,47	90,87	92,27	93,67
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	92	93	94	95
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	14	15	18	20

		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	81	82	83	84
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,63	86,48	87,34	88,19	89,05
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	3	4	5	6
		Jumlah desa pangan aman	1	1	1	1	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15,79%	31,58%	47,37%	68,42%	100,00%
4	Terlaksananya Penindakan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan	90	91	92	93	94

	Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT					
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
5	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,05	4,15	4,25	4,35	4,51
6	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75,29	76,29	77,29	78,29	80,00
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,70	2,80	2,90	2,95	3,00
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	100	100

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut:

Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Buleleng 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Sediaan farmasi dan pangan olahan di Seluruh Indonesia	2.459,26	2.705,18	2.975,70	3.273,27	3.600,60
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1.531,89	1.685,08	1.853,59	2.038,94	2.242,84
TOTAL	3.991,15	4.390,26	4.829,29	5.312,21	5.843,44

Tabel 4. 3 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Buleleng 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	3.991,15	4.390,26	4.829,29	5.312,21	5.843,44
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	-	-	-	-
TOTAL	3.991,15	4.390,26	4.829,29	5.312,21	5.843,44

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan BPOM dalam kurun waktu 2025-2029 serta dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan BPOM yang ingin dicapai. Pada akhir 2025- 2029, BPOM diharapkan mampu:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan bersama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman yang bermutu;
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE guna mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu;
3. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri sediaan farmasi dan pangan olahan aman serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM melalui berbagai kegiatan pembinaan/*regulatory assistance* yang diberikan kepada pelaku usaha;
4. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui penyelenggaraan fungsi deteksi kejahatan dan penyidikan yang optimal;
5. Mewujudkan BPOM sebagai organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta memberikan layanan publik yang prima.

BAB V

PENUTUP

Renstra Loka POM di Kabupaten Buleleng 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang selaras dengan amanah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Renstra Loka POM di Kabupaten Buleleng 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Buleleng baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Untuk memastikan Renstra yang disusun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Loka POM di Kabupaten Buleleng secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan Loka POM di Kabupaten Buleleng dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

LAMPIRAN 1

Kegiatan	Sasaran		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
	Kegiatan/Indikator/Rin ncian Output								(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Loka POM di Kabupaten Buleleng														UPT BPOM
Pengawasan Sediaan farmasi dan pangan olahan di Seluruh Indonesia									2.459,26	2.705,18	2.975,70	3.273,27	3.600,60	UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Buleleng	86,25	87,25	88,75	90,00	91,25						UPT BPOM
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Loka POM di Kabupaten Buleleng	0	27	28	29	30						UPT BPOM
	3	Persentase sampel	Loka POM	90	91	92	93	94						UPT BPOM

		pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	di Kabupaten Buleleng											
	4	Persentase Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Loka POM di Kabupaten Buleleng	100	100	100	100	100						UPT BPOM
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Buleleng	91	92	93	94	95						UPT BPOM
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	Loka POM di Kabupaten Buleleng	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00						UPT BPOM
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	Loka POM di Kabupaten Buleleng	86	87,5	89	90,5	92						UPT BPOM

		ditindaklanjuti sesuai ketentuan												
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Buleleng	91	92	93	94	95						UPT BPOM
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Buleleng	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00						UPT BPOM
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Buleleng	91	92	93	94	95						UPT BPOM
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Buleleng	88,07	89,47	90,87	92,27	93,67						UPT BPOM
	12	Persentase label	Loka POM	91	92	93	94	95						UPT BPOM

		produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	di Kabupaten Buleleng											
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Loka POM di Kabupaten Buleleng	100	100	100	100	100						UPT BPOM
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Loka POM di Kabupaten Buleleng	11	14	15	18	20						UPT BPOM
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Loka POM di Kabupaten Buleleng	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00						UPT BPOM
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang	Loka POM di	0	81	82	83	84						UPT BPOM

		ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kabupaten Buleleng											
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	Loka POM di Kabupaten Buleleng	0	25	25	25	25							UPT BPOM
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Loka POM di Kabupaten Buleleng	53	53	58	64	70							UPT BPOM
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Loka POM di Kabupaten Buleleng	124	125	132	138	145							UPT BPOM
	RO 4: Sarana Produksi Sediaan farmasi dan pangan olahan yang Diperiksa oleh UPT	Loka POM di Kabupaten Buleleng	35	24	26	28	30							UPT BPOM
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional,	Loka POM di Kabupaten	97	113	123	135	146							UPT BPOM

	Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Buleleng											
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM	Loka POM di Kabupaten Buleleng	84	84	84	84	84						UPT BPOM
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Loka POM di Kabupaten Buleleng	0	0	0	0	0						UPT BPOM
	RO 8: Laboratorium pengawasan Sediaan farmasi dan pangan olahan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Loka POM di Kabupaten Buleleng	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 9: Alat laboratorium	Loka POM	0	0	0	0	0						UPT BPOM

	untuk pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		di Kabupaten Buleleng										
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		Loka POM di Kabupaten Buleleng	0	111	111	111	111					UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas KIE												
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Loka POM di Kabupaten Buleleng	85,63	86,48	87,34	88,19	89,05					UPT BPOM
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Loka POM di Kabupaten Buleleng	2	3	4	5	6					UPT BPOM
	3	Jumlah desa pangan aman	Loka POM di Kabupaten Buleleng	1	1	1	1	1					UPT BPOM

	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Loka POM di Kabupaten Buleleng	1	1	1	1	1							UPT BPOM
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		Loka POM di Kabupaten Buleleng	101	200	240	288	346							UPT BPOM
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Sediaan farmasi dan pangan olahan oleh UPT		Loka POM di Kabupaten Buleleng	17	5	6	7	8							UPT BPOM
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		Loka POM di Kabupaten Buleleng	2	3	4	5	6							UPT BPOM
	RO 4: Desa Pangan Aman		Loka POM di Kabupaten Buleleng	1	1	1	1	1							UPT BPOM
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		Loka POM di Kabupaten	1	1	1	1	1							UPT BPOM

[illegible]

	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Loka POM di Kabupaten Buleleng	90	91	92	93	94							UPT BPOM
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Sediaan farmasi dan pangan olahan		Loka POM di Kabupaten Buleleng	1	1	1	1	2							UPT BPOM
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT														
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Loka POM di Kabupaten Buleleng	90	91	92	93	94							UPT BPOM
	RO 1: Laporan Analisis		Loka POM	14	14	15	15	15							UPT BPOM

	Kejahatan Sediaan farmasi dan pangan olahan oleh UPT		di Kabupaten Buleleng										
	Layanan Publik UPT yang prima												
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Loka POM di Kabupaten Buleleng	4,05	4,15	4,25	4,35	4,51					UPT BPOM
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		Loka POM di Kabupaten Buleleng	19	28	28	29	31					UPT BPOM
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal												
	1	Nilai AKIP UPT BPOM	Loka POM di Kabupaten Buleleng	75,29	76,29	77,29	78,29	80,00					UPT BPOM
	2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Loka POM di Kabupaten	5	5	5	5	5					UPT BPOM

			Buleleng											
	3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Loka POM di Kabupaten Buleleng	2,70	2,80	2,90	2,95	3,00						UPT BPOM
	4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Loka POM di Kabupaten Buleleng	100	100	100	100	100						UPT BPOM
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Sediaan farmasi dan pangan olahan		Loka POM di Kabupaten Buleleng	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 2: Sarana Pengawasan Sediaan farmasi dan pangan olahan di Seluruh Indonesia		Loka POM di Kabupaten Buleleng	3	3	3	3	3						UPT BPOM
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		Loka POM di Kabupaten Buleleng	4	4	4	4	4						UPT BPOM

Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								1.531,89	1.685,08	1.853,56	2.038,95	2.242,84	
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Loka POM di Kabupaten Buleleng	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Loka POM di Kabupaten Buleleng	1	1	1	1	1						UPT BPOM